



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7260864, Faksimili (021) 7392786

P E N G U M U M A N
NOMOR : 835/PENG/Sp/2024

TENTANG
RALAT PERIODE PENDAFTARAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
TAHUN 2024

Menyusuli Pengumuman Nomor 05/PENG/Mn/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Jabatan Fungsional Tahun 2024, bersama ini diumumkan perbaikan kesalahan penulisan periode pendaftaran pada batang tubuh pengumuman diktum 2 sebagai berikut:

Semula tertulis:

Periode pendaftaran dibuka tanggal 20 Agustus sampai dengan 02 September 2024

Diubah menjadi:

Periode pendaftaran dibuka tanggal 20 Agustus sampai dengan 06 September 2024

Sesuai dengan jadwal seleksi pengadaan CPNS yang ditetapkan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 13 Agustus 2024 dan sebagaimana telah tercantum pada Lampiran I Pengumuman Nomor 05/PENG/Mn/2024 halaman 17 huruf G.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 22 Agustus 2024
**Plt. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana**
Selaku Ketua Panitia Seleksi

Cap/ Ttd.

Budhi Setyawan
NIP. 196704231998031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7260864, Faksimili (021) 7392786

P E N G U M U M A N
Nomor : 05/PENG/Mn/2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 02 Juli 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Untuk Jabatan Fungsional, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil pada pengadaan CPNS Kementerian PUPR tahun 2024, terbagi atas kebutuhan jabatan fungsional sebagai berikut:
 - a. Tenaga teknis sebanyak 6.385 (enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) kebutuhan;
 - b. Tenaga kesehatan sebanyak 3 (tiga) kebutuhan.Adapun rincian mekanisme, persyaratan, dan kebutuhan jabatan pada Pengadaan CPNS Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.
2. Periode pendaftaran dibuka tanggal **20 Agustus sampai dengan 02 September 2024** secara daring melalui situs web **<https://sscasn.bkn.go.id>**
3. Seluruh informasi terkait proses Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional tahun 2024, dapat dilihat di situs web Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (**<https://sscasn.bkn.go.id>**) dan situs web Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (**<https://pu.go.id>**).
4. Seluruh proses Pengadaan CPNS Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional tahun 2024 **tidak dipungut biaya**.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 20 Agustus 2024

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,

Cap /Ttd.

Mohammad Zainal Fatah
NIP.196610211996031001

LAMPIRAN I PENGUMUMAN

Nomor : 05/PENG/Mn/2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 234.1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Sertifikat Seleksi Kompetensi Dasar *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara Pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

B. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN

Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional Tahun 2024 dibagi ke dalam 2 (dua) jenis alokasi kebutuhan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Alokasi kebutuhan umum**, yaitu alokasi kebutuhan yang dialokasikan untuk pelamar yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus seleksi pengadaan CPNS Kementerian PUPR tahun 2024 selain persyaratan yang diatur untuk jenis alokasi kebutuhan khusus.
2. Alokasi kebutuhan khusus, terbagi atas :
 - a. **Alokasi kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cum Laude**, yaitu alokasi kebutuhan khusus yang diperuntukan bagi pelamar yang merupakan :
 - 1) **Lulusan Sarjana (S.1)** dari Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau

- 2) **Lulusan Sarjana (S.1)** dari **Perguruan Tinggi luar negeri** dengan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/Cumlaude setelah memperoleh **penyetaraan** ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian”/Cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. serta memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus seleksi pengadaan CPNS Kementerian PUPR tahun 2024.
- b. **Alokasi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas**, yaitu alokasi kebutuhan khusus yang diperuntukan bagi pelamar dengan disabilitas yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus seleksi pengadaan CPNS Kementerian PUPR tahun 2024.
- c. **Alokasi kebutuhan khusus Diaspora**, yaitu alokasi kebutuhan khusus yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia yang memiliki paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya selama paling singkat 2 (dua) tahun, serta memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus seleksi pengadaan CPNS Kementerian PUPR tahun 2024.
- d. **Alokasi kebutuhan khusus Putra/Putri Papua**, yaitu alokasi kebutuhan khusus yang diperuntukan bagi pelamar yang merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua serta memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus seleksi pengadaan CPNS Kementerian PUPR tahun 2024.
- e. **Alokasi kebutuhan khusus Putra/Putri Kalimantan**, yaitu alokasi kebutuhan khusus pada unit-unit kerja yang diprioritaskan untuk dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan diperuntukan bagi pelamar yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan pada saat pembuatan akun di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) serta memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus seleksi pengadaan CPNS Kementerian PUPR tahun 2024.
3. Pelamar dengan disabilitas dapat melamar pada alokasi kebutuhan umum dan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas sepanjang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus seleksi pengadaan CPNS Kementerian PUPR tahun 2024 untuk alokasi kebutuhan yang dilamar.
4. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, pada saat mendaftar di situs web Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (<https://sscasn.bkn.go.id>) wajib **menyatakan diri sebagai penyandang disabilitas**.

C. PERSYARATAN

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang berusia **paling rendah 18 tahun 0 bulan 0 hari dan paling tinggi 35 tahun 0 bulan 0 hari** pada saat melamar (*menyelesaikan pendaftaran secara daring di situs web Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (<https://sscasn.bkn.go.id>)*).
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran serta dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir seleksi*).
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).

4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *(Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran)*.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis *(Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran)*.
6. Pelamar apabila dinyatakan lulus seleksi bersedia untuk :
 - a. ditempatkan seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
 - b. ditugaskan dan/atau dipindahtugaskan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat keluar dari lokasi penempatan/penggunaan yang dilamar termasuk ditugaskan dan/atau dipindahtugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) atau lokasi proyek di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dengan akses terbatas,
 - c. ditugaskan dalam penanganan kondisi darurat bencana,
 - d. bekerja dan mengabdikan paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
 - e. membatalkan perjanjian/kontrak kerja dengan swasta/instansi pemerintah lain lain, pada saat dinyatakan lulus. Dalam hal pelamar merupakan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pelamar wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun di instansi tempat bekerja dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang di instansi masing-masing pada saat pendaftaran.
(Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran).
7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di instansi manapun *(Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran)*.
8. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai *(Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran)*.
9. Bebas dari penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan tidak pernah terlibat tindak pidana terkait penyebaran Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya *(Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran serta dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA yang masih berlaku pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CPNS)*.
10. Memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sekurang-kurangnya kemampuan mengoperasikan sistem operasi, menggunakan aplikasi perkantoran (pengolah kata, presentasi, pengolah data dan grafis) dan menggunakan internet (pengoperasian email, kemampuan browsing/searching, pengoperasian aplikasi meeting online), dan pengoperasian TIK lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang pendidikan dan program studi) yang sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri yang jenjang pendidikan dan program studi dan/atau perguruan tingginya telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan mengacu pada tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau
 - b. Memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang jenjang pendidikan dan program studinya telah mendapat penyetaraan Ijazah luar negeri dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
 - c. Untuk **kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cum Laude)** berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Memiliki ijazah Sarjana (S.1) dari Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/Cumlaude dan berasal dari **Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul** pada saat kelulusan mengacu pada tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau
 - 2) Memiliki ijazah Sarjana (S.1) dari Perguruan Tinggi luar negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/Cumlaude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/Cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
 - d. Informasi akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari :
 - 1) Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (<https://pddikti.kemdikbud.go.id/>).
 - 2) Pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (<https://www.banpt.or.id/>).
 - e. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar **wajib telah memiliki ijazah Perguruan Tinggi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku)**.
 - f. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sebagai berikut :
 - 1) Minimal 2,75 pada skala 4 bagi pelamar pada jabatan yang mempersyaratkan jenjang pendidikan Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1) dan pelamar jabatan fungsional tenaga kesehatan (Dokter Ahli Pertama, Psikolog Klinis Ahli Pertama, dan Perawat Terampil);
 - 2) Minimal 3,25 pada skala 4,00 bagi pelamar pada jabatan yang mempersyaratkan jenjang pendidikan Magister (S.2) dan harus memiliki IPK minimal sesuai ketentuan poin 1) di atas, pada saat kelulusan Diploma Empat (D-IV)/Sarjana (S.1).
 - 3) Bagi pelamar formasi khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik (*Cum Laude*), minimal IPK 3,51 pada skala 4,00 dan status kelulusan berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude.
2. Memiliki kemampuan/menguasai bahasa Inggris dengan baik yang dibuktikan dengan salah satu jenis hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang diterbitkan paling lama tahun 2022, sebagai berikut :
 - a. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ETS (*Educational Testing Service*) berupa :
 - 1) TOEFL ITP/PBT (*Institutional Testing Program/Paper Based Test*) dengan skor minimal 450, atau
 - 2) TOEFL Computer Based Test (CBT) dengan skor minimal 131, atau
 - 3) TOEFL IBT (*Internet Based Test*) dengan skor minimal 45, atau
 - 4) TOEIC dengan skor minimal 440; atau

- b. Sertifikat kemampuan bahasa inggris IELTS (*International English Language Testing System*) dengan skor minimal 5; atau
 - c. Sertifikasi kemampuan bahasa inggris lainnya dengan standar penilaian lainnya seperti CEFR (*Common European Framework of Reference*), EF SET, EPT (*English Proficiency Test*), TOEFL *Prediction*, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Bahasa Perguruan Tinggi Swasta, Lembaga Bahasa Swasta lainnya dengan skala penilaian menyerupai/sama dengan/dapat disetarakan dengan skala penilaian pada huruf a) dan b) di atas.
3. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar (*dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter di Rumah Sakit Pemerintah/Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat yang berlaku, dan diserahkan pada saat dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir seleksi*). **Khusus bagi pelamar dengan disabilitas**, pada saat pendaftaran secara daring (*online*) di situs web seleksi calon aparatur sipil negara (<https://sscasn.bkn.go.id>) diwajibkan untuk :
 - a. melampirkan surat keterangan yang memuat jenis dan derajat kedisabilitasnya dari Dokter di Rumah Sakit Pemerintah/Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat yang dikeluarkan paling lama 6 (enam) bulan terakhir, dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
4. **Khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Diaspora** berlaku juga persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Merupakan warga negara Indonesia yang memiliki paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia (*dibuktikan dengan mengunggah Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku pada saat pendaftaran*), serta
 - b. bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya selama paling singkat 2 (dua) tahun (*dibuktikan dengan mengunggah Surat rekomendasi dari tempat bekerja yang menerangkan bahwa pelamar menetap di luar wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya selama paling singkat 2 (dua) tahun pada saat pendaftaran (Surat keterangan dibuat dalam Bahasa Inggris/Bahasa Indonesia)*).
 - c. tidak sedang menempuh pendidikan *post doctoral* yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*,
 - d. Bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri , dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila (*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara daring melalui situs *web* sistem seleksi calon aparatur sipil negara (<https://sscasn.bkn.go.id>).
2. Pada saat melakukan pendaftaran, pelamar hanya diperbolehkan :
 - a. melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tahun anggaran yang sama, dan
 - b. melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
3. Pelamar harap membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran daring (*online*) dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran daring sesuai tata cara yang tercantum pada situs *web* sistem seleksi calon aparatur sipil negara (<https://sscasn.bkn.go.id>).

4. Pelamar wajib mengunggah (*upload*) dokumen-dokumen kelengkapan yang berupa data digital/hasil pindai (*scan*) atas dokumen asli, sebagai berikut :
- Pas Foto terbaru, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan warna latar berwarna merah dalam file format jpg;
 - Hasil pindai (*scan*) KTP asli/Surat Keterangan asli Pengganti KTP dari Direktorat Jenderal/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Surat Keterangan asli Perekaman Data E-KTP dalam file format pdf;
 - Hasil pindai (*scan*) Surat Lamaran asli yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sudah ditandatangani dengan tinta hitam oleh pelamar serta dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- dalam file format pdf. (*surat lamaran yang diunggah harus merupakan hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran II pengumuman ini*);
 - Hasil pindai (*scan*) Surat Pernyataan Asli yang telah ditandatangani serta dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- dalam file format pdf. (*surat pernyataan yang diunggah berupa hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran III pengumuman ini*);
 - Hasil pindai (*scan*) ijazah asli sesuai yang dipersyaratkan dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - Khusus bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi luar negeri** wajib menyertakan hasil pindai (*scan*) Surat Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
 - Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mempersyaratkan pendidikan Magister (S-2)**, wajib menyertakan hasil pindai (*scan*) ijazah asli Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S-1).
 - Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan fungsional tenaga kesehatan Dokter Ahli Pertama dan Psikolog Klinis Ahli Pertama**, wajib menyertakan hasil pindai (*scan*) ijazah asli Sarjana (S-1) dan Profesi.
 - Hasil pindai (*scan*) transkrip/daftar nilai asli sesuai ijazah dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - Khusus bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi luar negeri yang melamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cum Laude)** menyertakan hasil pindai (*scan*) surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/Cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
 - Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mempersyaratkan pendidikan Magister (S-2)**, wajib menyertakan hasil pindai (*scan*) transkrip nilai asli Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S-1).
 - Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan fungsional tenaga kesehatan Dokter Ahli Pertama dan Psikolog Klinis Ahli Pertama**, wajib menyertakan transkrip nilai asli Sarjana (S-1) dan Profesi.
 - Sertifikat akreditasi program studi/ perguruan tinggi atau hasil tangkapan layar (*screenshot*) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) atau pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menunjukkan akreditasi program studi/ perguruan tinggi pada saat kelulusan (sesuai tanggal kelulusan pada ijazah) yang sesuai dengan syarat program studi pada jabatan yang dilamar. **Bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/Cum Laude diharuskan** untuk menyertakan Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi atau hasil tangkapan layar (*screenshot*) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) atau pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menunjukkan akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada saat kelulusan (sesuai tanggal kelulusan pada ijazah) dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman.

- h. Hasil pindai (*scan*) Sertifikat tes kemampuan Bahasa Inggris Asli dalam 1 (satu) file format pdf.
 - i. **Bagi pelamar kebutuhan jabatan fungsional tenaga kesehatan**, diharuskan mengunggah hasil pindai (*scan*) Surat Tanda Registrasi (STR) Asli sesuai jabatan yang dilamar dalam 1 (satu) file format pdf.
 - j. **Bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas**, diharuskan mengunggah :
 - 1) Hasil pindai (*scan*) surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas terkait kedisabilitasannya berupa 1 (file) format pdf multi halaman (*Surat keterangan sesuai format pada lampiran IV pengumuman ini atau format surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang isinya harus menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya*).
 - 2) Membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dengan ketentuan :
 - a) dalam video, seluruh badan peserta harus terlihat jelas;
 - b) memperlihatkan aktifitas dalam melaksanakan pekerjaan terutama aktifitas yang terkait jenis disabilitasnya;
 - c) durasi video sekurang-kurangnya 7 menit;
 - d) video diunggah dalam media google drive/aplikasi youtube, peserta menyampaikan link akses video melalui formulir yang sudah disediakan pada aplikasi pendaftaran (<https://sscasn.bkn.go.id>)
 - 4) Kewajiban unggah dokumen dan membuat video ini juga **berlaku bagi penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya** selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas (kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik (*Cum Laude*), Diaspora, Putra/i Kalimantan, dan Putra/i Papua).
 - k. **Bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri asli Papua**, diharuskan mengunggah :
 - 1) Hasil pindai (*scan*) akte kelahiran asli dan/atau surat keterangan lahir asli dalam file format pdf.
 - 2) Hasil pindai (*scan*) surat keterangan asli dari kepala desa/kepala suku yang menyatakan memiliki garis keturunan dari orang tua (Bapak/Ibu) asli Papua dalam file format pdf. (*surat keterangan sesuai format yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi pada lampiran V pengumuman ini atau format surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh kepala desa/kepala suku yang isinya harus menerangkan bahwa pelamar memiliki garis keturunan orang tua (Bapak/Ibu asli Papua)*).
 - l. **Bagi pelamar kebutuhan khusus diaspora**, diharuskan mengunggah :
 - 1) Hasil pindai (*scan*) Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman;
 - 2) Hasil pindai (*scan*) Surat rekomendasi dari tempat bekerja yang menerangkan bahwa pelamar menetap di luar wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya selama paling singkat 2 (dua) tahun (Surat keterangan dibuat dalam Bahasa Inggris/Bahasa Indonesia) dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman.
5. Pelamar harus memastikan seluruh dokumen yang diunggah di atas sudah lengkap, secara keseluruhan fisik dokumen terlihat jelas dan dapat dibaca sebelum memfinalkan proses pendaftaran.

E. TAHAPAN DAN SISTEM KELULUSAN SELEKSI

Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian PUPR secara daring atas dokumen yang diunggah (*upload*) oleh Pelamar pada saat pendaftaran.
- b. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- c. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
- d. Apabila dari dokumen yang diunggah (*upload*) oleh pelamar telah sesuai dengan ketentuan dan dapat menunjukkan yang bersangkutan memenuhi persyaratan, dinyatakan lolos seleksi administrasi.
- e. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada situs *web* Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan situs web Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://pu.go.id>).
- f. Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar.
- g. Pencetakan Kartu Tanda Peserta Seleksi dilakukan oleh masing-masing pelamar melalui situs *web* sistem seleksi calon aparatur sipil negara (<https://sscasn.bkn.go.id>).
- h. Hasil cetak Kartu Tanda Peserta Seleksi agar disimpan dengan baik sebagai kelengkapan pada saat pelaksanaan rangkaian seleksi.
- i. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan keberatan/sanggahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Sanggahan diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi melalui *situs web* sistem seleksi calon aparatur sipil negara (<https://sscasn.bkn.go.id>).
 - 2) Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian PUPR dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 - 3) Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian PUPR dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.
 - 4) Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi Pengadaan Calon CPNS Kementerian PUPR mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

2. Seleksi Kompetensi Dasar

- a. Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP), yang dilakukan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
- b. Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD pada setiap alokasi kebutuhan jabatan dan pendidikan didasarkan pada perankingan nilai peserta yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Jenis Kebutuhan	Nilai Ambang Batas			
		TWK	TIU	TKP	Kumulatif
1	Umum	65	80	166	
2	Putra/i Kalimantan	65	80	166	
2	Putra/i Lulusan Terbaik		85		311
3	Diaspora		85		311
3	Penyandang Disabilitas		60		286
5	Putra/i Papua		60		286

- c. Penilaian dan penetapan kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan pada ketentuan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara.
- d. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada pelaksanaan tes diwajibkan mengikuti seluruh tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
- e. Mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, maka kepada peserta yang pernah mengikuti Seleksi Pengadaan CPNS tahun anggaran 2023 dapat memilih untuk menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tahun anggaran 2023 pada Seleksi Pengadaan CPNS tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Melamar di sistem seleksi calon aparatur sipil negara (<https://sscasn.bkn.go.id>) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
 - 2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
 - 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada Seleksi Pengadaan CPNS tahun anggaran 2024;
 - 4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada Seleksi Pengadaan CPNS tahun anggaran 2024;
 - 5) Memenuhi nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis kebutuhan yang dilamar;
 - 6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada Seleksi Pengadaan CPNS tahun anggaran 2024.
 - 7) Pelamar yang memilih menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) tahun 2023, maka tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) tahun 2024.
 - 8) Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) tahun 2024, nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) yang digunakan adalah nilai seleksi kompetensi dasar tahun 2024 (nilai SKD terbaru).
- f. Terhadap Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur. Dikecualikan dari ketentuan ini bagi pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada poin e angka 7 di atas.
- g. Pelamar yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan pada *situs web* sistem seleksi calon aparatur sipil negara (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan situs web Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://pu.go.id>).

3. Seleksi Kompetensi Bidang

- a. Peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada setiap alokasi kebutuhan jabatan dan pendidikan berdasarkan peringkat tertinggi yang memenuhi nilai ambang batas SKD.
- b. Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) meliputi Seleksi Kompetensi Bidang berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) serta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tambahan berupa Psikotes secara daring (*online*). Dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 1) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) *Computer Assisted Test* (CAT), merupakan Uji pengetahuan terkait substansi jabatan yang dilamar oleh peserta. Pada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) *Computer Assisted Test* (CAT) tidak ada nilai ambang batas kelulusan.
 - 2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tambahan berupa Psikotes dilakukan untuk memprediksi potensi dari individu sesuai kebutuhan jabatan, dengan metode tes berbasis komputer (*computer based test*) dengan hasil penilaian *real time*.
 - a) Untuk mengukur potensi peserta seleksi pada setiap jabatan, maka jabatan-jabatan yang dibuka pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2024 dikelompokkan berdasarkan karakteristik jabatan sebagai berikut :

NO	JABATAN
Kelompok I	
1.	Analisis Anggaran Ahli Pertama
2.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
3.	Penata Ruang Ahli Pertama
4.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
5.	Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Pertama
6.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
7.	Perencana Ahli Pertama
8.	Analisis Hukum Ahli Pertama
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
10.	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
11.	Statistisi Ahli Pertama
Kelompok II	
12.	Analisis Kerja Sama Ahli Pertama
13.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama
14.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama
Kelompok III	
15.	Arsiparis Ahli Pertama
16.	Dokter Ahli Pertama
17.	Dosen Asisten Ahli

NO	JABATAN
18.	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama
19.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
20.	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
21.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
22.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama
23.	Pranata Komputer Ahli Pertama
24.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama
25.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama
26.	Widyaiswara Ahli Pertama
27.	Pustakawan Ahli Pertama
28.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama
29.	Psikolog Klinis Ahli Pertama
30.	Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil
31.	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil
32.	Penata Laksana Barang Terampil
33.	Pranata Komputer Terampil
34.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil
35.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil
36.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil
37.	Pranata Keuangan APBN Terampil
38.	Arsiparis Terampil
39.	Perawat Terampil
Kelompok IV	
40.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
21.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Utama
Kelompok V	
42.	Auditor Ahli Pertama
43.	Auditor Terampil

- b) Berdasarkan prinsip pengelompokkan formasi sebagaimana tersebut di atas, pembagian prioritas aspek yang diukur pada masing-masing kelompok jabatan adalah sebagai berikut :

NO	KELOMPOK	PEMBAGIAN ASPEK
1	Kelompok I	Inti: 1. Logika berpikir 2. Fleksibilitas berpikir 3. Perencanaan kerja 4. Inovasi 5. Toleransi terhadap stres Penunjang: 6. Kemampuan verbal 7. Komitmen terhadap tugas 8. Kerjasama 9. Orientasi pada kualitas Tambahan: 10. Penyesuaian diri 11. Kepercayaan diri 12. Pengendalian emosi 13. Hasrat berprestasi 14. Kepemimpinan 15. Orientasi pada pelayanan 16. Integritas
2	Kelompok II	Inti: 1. Kemampuan verbal 2. Kerjasama 3. Toleransi terhadap stress 4. Orientasi pada pelayanan 5. Fleksibilitas berpikir Penunjang: 6. Logika berpikir 7. Perencanaan kerja 8. Penyesuaian diri 9. Orientasi pada kualitas Tambahan: 10. Kepercayaan diri 11. Pengendalian emosi 12. Hasrat berprestasi 13. Kepemimpinan 14. Komitmen terhadap tugas 15. Integritas 16. Inovasi
3	Kelompok III	Inti: 1. Logika berpikir 2. Kerjasama 3. Komitmen terhadap tugas 4. Orientasi pada kualitas 5. Toleransi terhadap stres Penunjang: 6. Fleksibilitas berpikir 7. Kemampuan verbal 8. Penyesuaian diri

NO	KELOMPOK	PEMBAGIAN ASPEK
		9. Orientasi pada pelayanan Tambahan: 10. Kepercayaan diri 11. Pengendalian emosi 12. Hasrat berprestasi 13. Kepemimpinan 14. Perencanaan kerja 15. Integritas 16. Inovasi
4	Kelompok IV	Inti: 1. Kemampuan verbal 2. Orientasi pada pelayanan 3. Kerjasama 4. Fleksibilitas berpikir 5. Toleransi terhadap stres Penunjang: 6. Penyesuaian diri 7. Perencanaan kerja 8. Komitmen terhadap tugas 9. Pengendalian emosi Tambahan: 10. Logika berpikir 11. Kepercayaan diri 12. Hasrat berprestasi 13. Kepemimpinan 14. Integritas 15. Orientasi pada kualitas 16. Inovasi
5	Kelompok V	Inti: 1. Logika berpikir 2. Orientasi pada kualitas 3. Toleransi terhadap stres 4. Integritas 5. Kepercayaan diri Penunjang: 6. Kemampuan verbal 7. Penyesuaian diri 8. Pengendalian emosi 9. Komitmen terhadap tugas Tambahan: 10. Fleksibilitas berpikir 11. Kerjasama 12. Hasrat berprestasi 13. Kepemimpinan 14. Perencanaan kerja 15. Orientasi pada pelayanan 16. Inovasi

- c) bobot atas aspek – aspek penilaian psikotes adalah sebagai berikut :
- Aspek Inti memiliki bobot 62.5%;
 - Aspek Penunjang memiliki bobot 20%;
 - Aspek Tambahan memiliki bobot 17.5%;
- d) Rentang/Skala penilaian untuk setiap sub aspek adalah 1 sampai dengan 5.
- e) Tata cara perhitungan penilaian adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l}
 \left[\frac{\sum \text{Nilai capaian aspek inti peserta}}{\sum \text{Nilai maksimal aspek inti}} \times 62.5 \% \right] + \left[\frac{\sum \text{Nilai capaian aspek penunjang peserta}}{\sum \text{Nilai maksimal aspek penunjang}} \times 20 \% \right] \\
 + \left[\frac{\sum \text{Nilai capaian aspek tambahan peserta}}{\sum \text{Nilai maksimal aspek tambahan}} \times 17.5 \% \right] = \text{Hasil Psikotes}
 \end{array}$$

- f) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tambahan berupa Psikotes bersifat **menggugurkan** dengan nilai ambang batas, adalah sebagai berikut :
- Memenuhi Syarat :
 - Potensi fit/Hasil Psikotes $\geq 64\%$ dari nilai maksimal 100%, dan
 - Nilai/Skor Aspek Integritas ≥ 4 dari nilai maksimal 5.
 - Tidak Memenuhi Syarat
 - Potensi fit/Hasil Psikotes $< 64\%$ dari nilai maksimal 100%, dan/atau
 - Nilai/Skor Aspek Integritas < 4 dari nilai maksimal 5.
- g) Atas peserta yang hasil penilaian seleksi kompetensi bidang tambahan Psikotes dinyatakan memenuhi syarat, maka hasil nilai seleksi kompetensi bidang yang bersangkutan akan diintegrasikan dengan nilai seleksi kompetensi dasar pada penilaian akhir penentuan kelulusan.
- h) Sedangkan, atas peserta yang hasil penilaian seleksi kompetensi bidang tambahan psikotes dinyatakan **tidak memenuhi syarat**, maka hasil nilai seleksi kompetensi bidang yang bersangkutan tidak akan diintegrasikan dengan nilai seleksi kompetensi dasar pada penilaian akhir penentuan kelulusan atau dinyatakan **gugur**.
- Hasil akhir nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah hasil integrasi antara nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis CAT dengan bobot penilaian sebesar 60% dan hasil seleksi kompetensi bidang tambahan psikotes dengan bobot penilaian sebesar 40%.
 - Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada pelaksanaan tes diwajibkan mengikuti seluruh tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
 - Terhadap Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti seluruh rangkaian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.

F. PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI

Penilaian dan prinsip penentuan kelulusan peserta mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

- Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan **perankingan hasil pengolahan integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot penilaian sebesar 40% dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot penilaian sebesar 60%.**

2. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud di atas, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
 - a. nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
3. Untuk pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi dapat diisi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi jabatan pada alokasi kebutuhan umum yang belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar kebutuhan khusus yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
 - b. Bagi jabatan pada alokasi kebutuhan khusus yang belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik;
 - c. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud poin a dan b di atas, dapat diisi dari pelamar kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan sama pada unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan Putra/i Papua.
4. Pengumuman kelulusan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional Tahun 2024 akan ditayangkan melalui situs web sistem seleksi calon aparatur sipil negara (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan situs web Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://pu.go.id>).
5. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan. sanggahan sebagaimana dimaksud diajukan melalui situs *web* sistem seleksi calon aparatur sipil negara (<https://sscasn.bkn.go.id>).
6. Terkait pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, Panitia seleksi pengadaan CPNS Kementerian PUPR dapat :
 - a. menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 - b. menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
 - c. menolak alasan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
7. Dalam hal Panitia seleksi pengadaan CPNS Kementerian PUPR menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud, Panitia seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaporkan kepada ketua Panitia Seleksi Nasional untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi.
8. Panitia seleksi pengadaan CPNS Kementerian PUPR berdasarkan persetujuan ketua Panitia Seleksi Nasional, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

9. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetapi di kemudian hari :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Feromasi Birokrasi;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia.

Maka Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Panitia seleksi pengadaan CPNS Kementerian PUPR dapat membatalkan kelulusan serta mengganti kelulusan yang bersangkutan dengan peserta lain sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai Rp 10.000,-, dan Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan Pelamar yang memiliki peringkat terbaik sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan rekomendasi dari ketua Panitia Seleksi Nasional.
11. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk pegawai kemudian mengundurkan diri selama berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara berikutnya.
12. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus seleksi dan telah mendapatkan Nomor Induk Pegawai, serta kemudian mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

G. JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal dan lokasi pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Jadwal Umum Pelaksanaan Seleksi :

NO	TAHAPAN	JADWAL PELAKSANAAN
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
4	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
7	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
8	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
9	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNSTahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
10	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
11	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
11	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
12	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
13	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
14	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
15	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL PELAKSANAAN
16	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
17	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
18	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
19	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
20	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
21	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
22	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
23	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
24	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
25	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
26	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
27	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
28	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
29	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
30	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Jadwal pelaksanaan seleksi dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat kebijakan baru dari Panitia Seleksi Nasional.

2. Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) :
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang *Computer Assisted Test* (CAT) akan dilaksanakan di fasilitas *Computer Assisted Test* (CAT) yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Sedangkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (Psikotes) dilaksanakan secara daring (*online*).
 - b. Pelamar dibebaskan untuk memilih lokasi seleksi (Dianjurkan untuk memilih lokasi seleksi yang paling dekat dengan domisili pelamar sehingga memudahkan akses pelamar).
 - c. Jadwal dan alamat lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang *Computer Assisted Test* (CAT), akan diumumkan kemudian.

II. LAIN-LAIN

1. Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian PUPR **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**
2. Segala biaya/akomodasi selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh Pelamar.
3. Kementerian PUPR tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatas-namakan Kementerian PUPR atau Panitia Seleksi sehingga **peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara.**

4. Berkas lamaran yang dikirimkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum pengumuman pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2024 dan tidak mengikuti prosedur pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2024 tidak akan diproses dan dianggap tidak berlaku serta tidak dapat diminta kembali.
5. Panitia membuka jalur layanan bantuan dan informasi melalui :
 - a. **Telepone (*hotline*)** bagi para pelamar pada **hari dan jam kerja**, Senin–Jumat, pukul 08:00–16:00 WIB **selama periode pendaftaran** (Panitia tidak melayani SMS).

Layanan Informasi
0818-0312-1945 dan 0819-0312-1945

- b. **Sosial Media** melalui :

Layanan	Alamat Url./Akun
X (twitter)	seleksiasnpupr
Instagram	bkopupr

6. Informasi terkini mengenai hal–hal lain yang berkaitan dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 (pelaksanaan ujian, pengumuman kelulusan, dan lain-lain) akan ditentukan kemudian dan diinformasikan melalui situs web Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (<https://sscasn.bkn.go.id>) dan situs web Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://pu.go.id>).

Jakarta, 20 Agustus 2024

**a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,**

Cap / Ttd.

**Mohammad Zainal Fatah
NIP.196610211996031001**

**LAMPIRAN II
PENGUMUMAN**

Nomor : 05/PENG/Mn/2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

Format Surat Lamaran

....., ... 2024

**Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia
di –
Jakarta**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Jenis Kebutuhan dan
Jabatan yang dilamar :
Alamat Domisili Saat Ini :

Dengan ini menyampaikan permohonan agar dapat mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen, sebagai berikut :

1. Pasfoto terbaru dengan latar belakang warna merah.
2. Hasil pindai (scan) Surat Pernyataan Asli.
3. Hasil pindai (scan) Ijazah asli.
4. Hasil pindai (scan) Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. **(khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri*)**.
5. Hasil pindai (scan) transkrip nilai asli.
6. Hasil pindai (scan) Surat Keterangan Lulus dengan Pujian/Cumlaude asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **(khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik lulusan perguruan tinggi luar negeri*)**.
7. Hasil pindai (scan) Surat Tanda Registrasi Asli **(khusus bagi pelamar tenaga kesehatan*)**.
8. Hasil pindai (scan) sertifikat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi atau tangkapan layar PDDIKTI/BANPT untuk akreditasi prodi.
9. Hasil pindai (scan) sertifikat akreditasi program studi dan perguruan tinggi atau tangkapan layar PDDIKTI/BANPT untuk akreditasi program studi dan perguruan tinggi **(khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik*)**.
10. Hasil scan Sertifikat tes kemampuan Bahasa Inggris Asli.
11. Hasil scan Surat Keterangan Dokter tentang kedisabilitas **(khusus bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum/kebutuhan khusus lainnya*)**.
12. Hasil scan akte kelahiran asli dan/atau surat keterangan lahir asli **(khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua*)**.
13. Hasil scan surat keterangan asli dari kepala desa/kepala suku **(khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua*)**.
14. Hasil pindai (scan) Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku **(khusus bagi pelamar kebutuhan khusus diaspora*)**.
15. Hasil pindai (scan) Surat rekomendasi dari tempat bekerja **(khusus bagi pelamar kebutuhan khusus diaspora*)**.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024 dan bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hormat Saya,

Ttd.

(Nama Lengkap)

E-Materai
Rp. 10.000

*) Hapus/hilangkan yang tidak perlu

**LAMPIRAN III
PENGUMUMAN**

Nomor : 05/PENG/Mn/2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Induk Kependudukan :
Alamat Sesuai KTP :

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Benar-benar sudah memahami dan memenuhi ketentuan persyaratan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 dan semua kelengkapan dokumen yang diunggah (*diupload*) pada saat pendaftaran adalah benar sesuai dengan aslinya.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di instansi manapun.
8. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.
9. Bersedia untuk :
 - a. ditempatkan seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
 - b. ditugaskan dan/atau dipindahtugaskan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat keluar dari lokasi penempatan/pengugasan yang dilamar termasuk ditugaskan dan/atau dipindahtugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) atau lokasi proyek di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dengan akses terbatas,
 - c. ditugaskan dalam penanganan kondisi darurat bencana,
 - d. bekerja dan mengabdikan paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
 - e. membatalkan perjanjian/kontrak kerja dengan swasta/instansi pemerintah lain, pada saat dinyatakan lulus.
10. Bebas dari penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan tidak pernah terlibat tindak pidana terkait penyebaran Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
11. Tidak sedang menempuh pendidikan post doctoral yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (**khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Diaspora***).
12. Bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila (**khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Diaspora***).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dibatalkan keikutsertaan dan/atau kelulusan dalam proses seleksi dan bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ... 2024
Yang membuat pernyataan,

e-materai
Rp. 10.000,-

Ttd

(Nama Lengkap)

*) Hapus/hilangkan yang tidak perlu

**LAMPIRAN IV
PENGUMUMAN**

Nomor : 05/PENG/Mn/2024
Tanggal: 20 Agustus 2024

Format Surat Keterangan Penyandang Disabilitas

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama	:	Jenis Kelamin : Laki/Perempuan*)
Umur	:	
NIK	:	
Ada disabilitas	:	Ya/Tidak*)
Lokasi disabilitas	:	

- Susunan syaraf pusat
sebutkan _____
- Organ Penginderaan
Sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya*)
- Tangan dominan kanan/kiri*)
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya*)
- Lain – lain _____

ANAMNESIS)**

1. Riwayat disabilitas	:	
		13. Sejak lahir
		14. Sesudah kecelakaan, pada tahun _____
		15. Sesudah sakit, pada tahun _____

a. Kemampuan mengurus diri*)	:	
	i.	Mampu
	i.	Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
	i.	Perlu bantuan penuh orang lain

b. Bepergian keluar rumah	:	
	i.	Bisa sendiri/perlu diantar anggota keluarga*)

HASIL PEMERIKSAAN **)

c. Jenis disabilitas	a.	Disabilitas Fisik
	i.	Amputasi (Tangan/Kaki)*)
	ii.	Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
	iii.	Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
	iv.	<i>Cerebral Palsy (CP)</i>

- b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta Total
 - b) Persepsi cahaya/*Low Vision*
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara

- c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) *Down Syndroma*
- d. Disabilitas Mental
 - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas dan Gangguan Kepribadian) *)
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) *)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan mobilitas :

- 1) Jalan/Jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan *)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

8. Alat bantu yang digunakan :

- : Ada/Tidak*), sebutkan _____
- 9. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan _____
- 10. Pengobatan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

Catatan Tambahan Lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan
Dokter yang memeriksa

Nama Dokter
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

**) wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas

***) Dapat dibuat dalam format lainnya sesuai yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas selama dengan jelas menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya.

**LAMPIRAN V
PENGUMUMAN**

Nomor : 05/PENG/Mn/2024
Tanggal: 20 Agustus 2024

Format Surat Keterangan
Putra/Putri Papua

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :

Selaku Kepala Suku/Kepala Desa/Lurah*) (*diisi dengan nama suku/nama desa/nama kelurahan*), dengan ini menerangkan bahwa Saudara/Saudari :

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

Adalah benar merupakan putra/putri keturunan asli Papua dari garis keturunan ayah dan/atau ibu yang bernama (*diisi dengan nama ayah/ibu*).

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024 **Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua**. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

....., ...2024
Yang Membuat Pernyataan
Jabatan

(Nama Lengkap)
NIK.

*) Dapat dibuat dalam format lainnya selama isinya menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan asli Papua dari garis keturunan ayah dan/atau ibu asli Papua

**LAMPIRAN VI
PENGUMUMAN**

Nomor : 05/PENG/Mn/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

**ALOKASI KEBUTUHAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN				3				
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	PROFESI DOKTER	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Klinik Utama Kementerian PUPR KLINIK UMUM (Akan ditugaskan di Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang, Jawa Tengah)	1	Rp10.800.000	Rp11.400.000	Akan ditempatkan di Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang, Jawa Tengah. Dokter mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.	Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
2	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI + PROFESI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS - S-1 PSIKOLOGI + PENGUKUHAN PSIKOLOG KLINIS - S-2 PSIKOLOGI PROFESI KONSENTRASI PSIKOLOGI KLINIS - PROFESI PSIKOLOGI (MINAT PSIKOLOGI KLINIS)	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Klinik Utama Kementerian PUPR KLINIK UMUM (Akan ditugaskan di Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang, Jawa Tengah)	1	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Akan ditempatkan di Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang, Jawa Tengah. Memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologis klinis, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat	Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
3	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Klinik Utama Kementerian PUPR KLINIK UMUM (Akan ditugaskan di Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang, Jawa Tengah)	1	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Akan ditempatkan di Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang, Jawa Tengah. Perawat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pelayanan Keperawatan pada Fasyankes atau Fasilitas Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pemerintah (Politeknik Pekerjaan Umum yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah). Tugas Jabatan Fungsional Perawat yaitu melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan.	Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku

**ALOKASI KEBUTUHAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS JENJANG AHLI PERTAMA (S-2)				52				
1	DOSEN ASISTEN AHLI	S-2 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-2 TEKNIK SIPIL - S-2 TEKNIK GEODESI	DIASPORA	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Prodi D-III Teknologi Konstruksi Bangunan Air	1	Rp10.800.000	Rp11.400.000	Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat	
2	DOSEN ASISTEN AHLI	S-2 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-2 TEKNIK SIPIL - S-2 TEKNIK GEODESI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Prodi D-III Teknologi Konstruksi Bangunan Air	4	Rp10.800.000	Rp11.400.000	Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat	
3	DOSEN ASISTEN AHLI	S-2 TEKNIK SIPIL - S-2 TEKNIK ARSITEKTUR - S-2 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-2 TEKNIK LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Prodi D-III teknologi Konstruksi Bangunan Gedung	5	Rp10.800.000	Rp11.400.000	Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat	
4	DOSEN ASISTEN AHLI	S-2 TEKNIK SIPIL - S-2 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Prodi D-III Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan	5	Rp10.800.000	Rp11.400.000	Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat	
5	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
6	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SEKSI KAJIAN BENDUNGAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
8	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SEKSI PEMANTAUAN BENDUNGAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
9	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SEKSI PROGRAM, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
10	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
11	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
12	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
14	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
15	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Wilayah III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
16	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
17	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
18	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Wilayah III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
20	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
21	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
22	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
23	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Wilayah III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
24	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
26	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
27	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Wilayah III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
28	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
29	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
30	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
32	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
33	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Wilayah III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
34	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bidang Perencanaan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
35	WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN	
36	WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN	

**ALOKASI KEBUTUHAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS JENJANG AHLI PERTAMA (S-1/D-IV)				5.351				
1	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN	
2	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
3	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
4	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
5	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
6	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
7	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
9	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
10	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
11	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
12	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
13	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
14	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
15	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
17	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
18	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
19	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
20	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
21	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
22	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
23	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
25	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Subbagian Umum dan Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
26	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
27	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subbagian Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
28	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subbagian Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
29	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
30	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
31	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subbagian Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
33	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
34	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subbagian Tata Usaha	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
35	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
36	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
37	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Keuangan Bagian Pelaksanaan Anggaran	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN	
38	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Keuangan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN	
39	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara SUBBAGIAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
40	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Bagian Administrasi Penganggaran	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN, meliputi: pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Analisis anggaran melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN	
42	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
43	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
44	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
45	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
47	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
48	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
49	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
51	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
52	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
53	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
55	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
56	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
57	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pengadaan Tanah	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pengadaan Tanah	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
59	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
60	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
61	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
63	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
64	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
66	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
67	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
69	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
70	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
72	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
73	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
75	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
76	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
78	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
79	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
81	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
82	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
84	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
85	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
87	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
88	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
90	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
91	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Sains Bangunan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Air Minum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
93	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
94	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Minum Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
96	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
97	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
99	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
100	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
102	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
103	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
105	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
106	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
107	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
109	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
110	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	8	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
111	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
112	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
113	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
115	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
116	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
117	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
118	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
119	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
120	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
121	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
122	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
123	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
125	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
126	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
127	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Pantai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
128	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Rawa SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
129	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
130	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
131	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
132	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
133	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
135	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
136	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
137	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
138	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
139	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
140	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
141	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
142	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
143	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
145	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
146	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
147	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
148	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
149	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
150	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
151	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
152	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
153	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
155	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
156	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
157	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
158	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
159	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
160	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
161	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilingkungan unit kerja	
162	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik BAGIAN PELAPORAN PIMPINAN DAN PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Fasilitas Pemanfaatan dan Penertiban Barang Milik Negara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
164	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Analis Hukum yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.	
165	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara SUBBAGIAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	
166	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan dan/ atau menyelesaikan masalah-masalah publik di lingkungan BPIW	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
168	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Sanitasi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Kepegawaian dan Umum	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik	
170	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik	
171	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-T REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN							
172	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	
173	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan dan/ atau menyelesaikan masalah-masalah publik di lingkungan BPIW	
174	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan dan/ atau menyelesaikan masalah-masalah publik di lingkungan BPIW	
176	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Penyusun Program dan Pelaporan SUBBAGIAN MATERI SIDANG DAN PELAPORAN	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Ditjen Sumber Daya Air	
177	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan BIDANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	
178	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik	
179	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan terkait penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal, penyiapan pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan anggaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal	
180	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan dan/ atau menyelesaikan masalah-masalah publik di lingkungan BPIW	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Ditjen Sumber Daya Air	
182	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Sekretariat Jenderal Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan BIDANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	
183	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik	
184	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik	
185	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Ditjen Sumber Daya Air	
186	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis kegiatan pelaksanaan kerja sama internal dan eksternal di dalam cakupan pengembangan kewilayahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
187	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Keterpaduan Program	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas penyusunan kebijakan teknis	
188	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Kepatuhan Intern	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko	
189	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan dan/ atau menyelesaikan masalah-masalah publik di lingkungan BPIW	
190	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN -	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN							
191	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Ditjen Sumber Daya Air	
192	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Subdirektorat Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
194	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan dan/ atau menyelesaikan masalah-masalah publik di lingkungan BPIW	
195	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis kegiatan pelaksanaan kerja sama internal dan eksternal di dalam cakupan pengembangan kewilayahan	
196	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
197	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Ditjen Sumber Daya Air	
198	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan dan/ atau menyelesaikan masalah-masalah publik di lingkungan BPIW	
199	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan dan/ atau menyelesaikan masalah-masalah publik di lingkungan BPIW	
201	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan dan/ atau menyelesaikan masalah-masalah publik di lingkungan BPIW	
202	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Tata Usaha SUBBAGIAN PELAYANAN PERSIDANGAN	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Ditjen Sumber Daya Air	
203	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN -	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Air Minum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-T REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN							
204	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subdirektorat Perencanaan Teknis Prasarana Strategis	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	
205	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Keterpaduan Program	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas penyusunan kebijakan teknis	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik	
207	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Bagian Kerja Sama Luar Negeri	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan terkait penyiapan koordinasi rencana, program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri, administrasi kerja sama luar negeri, diantaranya pinjaman dan hibah luar negeri, kerja sama teknik internasional, penugasan dan perizinan tenaga ahli warga negara asing, serta perjalanan dinas luar negeri	
208	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Bidang Kepatuhan Intern	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	
209	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Minum Subdirektorat Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	
211	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Kepatuhan Intern	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko	
212	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan BIDANG DUKUNGAN TEKNIS PIMPINAN	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	
214	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU EKONOMI - D-IV HUKUM - D-IV ARSITEKTUR - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Subdirektorat Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	
216	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
218	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
219	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
220	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU EKONOMI - D-IV HUKUM - D-IV ARSITEKTUR - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
222	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU EKONOMI - D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV HUKUM - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN - D-IV ARSITEKTUR - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Subdirektorat Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
223	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Keterpaduan Program	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
224	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
225	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
227	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Kepatuhan Intern	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
228	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 AKTUARIA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
230	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Subdirektorat Kepatuhan Intern	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
232	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
233	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
235	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
236	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU EKONOMI - D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV HUKUM - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN - D-IV ARSITEKTUR - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA							
237	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU EKONOMI - D-IV HUKUM - D-IV ARSITEKTUR - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
238	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan di dalam cakupan pengembangan kewilayahan	
239	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU EKONOMI - D-IV HUKUM - D-IV ARSITEKTUR - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Bidang Investasi Jalan Tol	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
240	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
241	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Subdirektorat Kepatuhan Intern	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
242	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Kepatuhan Intern	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	
243	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU EKONOMI - D-IV HUKUM - D-IV ARSITEKTUR - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan di dalam cakupan pengembangan kewilayahan	
245	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU EKONOMI - D-IV HUKUM - D-IV ARSITEKTUR - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
246	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU EKONOMI - D-IV HUKUM - D-IV ARSITEKTUR - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Sanitasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	
248	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
250	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi	
251	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
252	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
253	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
255	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
256	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
258	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Rawa SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
259	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
260	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
261	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
262	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
263	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM BISNIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
265	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
266	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
267	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
269	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yg meliputi: perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
270	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jembatan Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK							
271	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
272	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
273	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
274	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
275	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
276	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
277	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
278	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
279	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Subbagian Umum dan Tata Usaha	16	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
281	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I .Yogyakarta Bagian Umum Dan Tata Usaha	8	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
282	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Tata Usaha SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
283	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
284	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
286	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
287	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Sains Bangunan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
288	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
289	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
290	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
291	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jembatan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
292	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Subbagian Umum dan Tata Usaha	13	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
293	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
294	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subbagian Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
295	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
296	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
297	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
298	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik SUBBAGIAN TATA USAHA	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan Kegiatan Analisis Di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Sesuai Kewenangan Dan Peraturan Perundang-Undangan, Meliputi Perikatan Dan Penyelesaian Tagihan, Pelaksanaan Perintah Pembayaran, Dan Analisis Laporan Keuangan Instansi	
299	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jalan SUBBAGIAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
301	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
303	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	10	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
304	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
305	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
306	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Subbagian Umum dan Tata Usaha	15	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
307	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
308	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Bagian Administrasi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
310	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis laporan keuangan instansi	
311	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
312	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
313	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
315	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
316	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
317	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
318	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
319	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua	10	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
320	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis laporan keuangan instansi pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
321	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
322	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
323	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
324	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
325	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
326	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
327	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Subbagian Umum dan Tata Usaha	14	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
328	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
329	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
330	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
331	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
332	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
333	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
334	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subbagian Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
335	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Subbagian Umum dan Tata Usaha	15	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
336	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
338	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
339	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
340	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
341	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
342	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
343	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
344	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
345	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
346	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
347	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis laporan keuangan instansi	
348	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
349	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Keuangan Bagian Pelaksanaan Anggaran	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga	
350	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
352	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
353	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
354	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
355	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
356	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
357	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
358	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
359	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
360	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Jembatan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
361	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
363	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
364	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subbagian Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
366	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
367	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
368	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
369	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
370	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Fasilitas Pemanfaatan dan Penertiban Barang Milik Negara	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis, evaluasi, dan penyusunan kebijakan anggaran negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
371	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Subbagian Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
372	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
373	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
374	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
375	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Subbagian Umum dan Tata Usaha	16	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
376	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Subbagian Umum dan Tata Usaha	16	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
377	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
378	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
379	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
380	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Pantai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
382	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	19	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
383	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
384	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi	
385	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
386	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
387	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Bagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
388	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
389	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
390	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Air Minum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
391	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Fasilitas Pemanfaatan dan Penertiban Barang Milik Negara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis, evaluasi, dan penyusunan kebijakan anggaran negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan	
392	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
393	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Tata Usaha SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
394	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Tata Usaha SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
395	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
396	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
397	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
398	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
399	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
400	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
402	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
404	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
406	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
407	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
408	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
410	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
411	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
412	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
413	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
414	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
415	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
416	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
417	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
418	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
419	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
420	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
421	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
422	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
423	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
425	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
426	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pengadaan Tanah	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
427	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
428	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
429	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
430	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
431	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
432	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
433	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
434	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
435	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	PENYANDANG DISABILITAS	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi	
436	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.II .Yogyakarta Bagian Umum Dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
437	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
438	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
439	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
440	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
442	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
443	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis laporan keuangan instansi pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
444	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
445	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
446	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
447	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
449	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
450	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
451	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
452	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
453	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Subbagian Umum dan Tata Usaha	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
454	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis, evaluasi, dan penyusunan kebijakan anggaran negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan	
455	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
456	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
457	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
458	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subbagian Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
459	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
460	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
461	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
462	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
463	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Seksi Pelaksana Wilayah II	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
464	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
465	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
467	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
468	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
469	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara SUBBAGIAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
470	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
471	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Irigasi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
472	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
473	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
474	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Bagian Umum dan Tata Usaha	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
475	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
476	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
478	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
479	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
480	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
481	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
482	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sungai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
483	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
484	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Sains Bangunan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
485	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
486	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan SUBBAGIAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
487	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
488	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
489	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
490	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
491	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
492	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
493	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan SUBBAGIAN TATA USAHA	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
494	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
495	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
496	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
497	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
498	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
499	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Subbagian Umum dan Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
501	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
502	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
503	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
504	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
505	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
506	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
507	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung	8	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
508	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Bahan Jalan Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK							
509	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
510	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
511	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
512	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
513	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
514	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
515	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
516	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jembatan Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
517	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
518	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
519	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
520	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Subbagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	16	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
522	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
523	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Subbagian Umum dan Tata Usaha	16	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
524	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
525	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
527	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
528	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
529	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
530	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	13	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
531	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
532	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
533	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
535	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
536	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
537	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
538	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
539	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK							
540	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
541	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
543	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
544	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subbagian Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
545	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subbagian Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
546	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
547	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
548	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
549	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
550	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
551	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
552	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
553	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Subbagian Umum dan Tata Usaha	9	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
554	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
555	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
556	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Subbagian Umum dan Tata Usaha	15	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	
557	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
558	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Subbagian Umum dan Tata Usaha	19	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
559	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
560	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	9	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
561	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
562	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi SUBBAGIAN TATA USAHA	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi.	
563	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Subbagian Umum dan Tata Usaha	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
564	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
565	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
566	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
567	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pengadaan Tanah	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
568	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
569	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
570	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
571	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
572	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
573	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Minum Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
574	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
575	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Subbagian Umum dan Tata Usaha	15	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
576	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
577	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
578	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
579	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
580	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
581	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ILMU AKTUARIA - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 SAINS AKTUARIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
582	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
583	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 KEUANGAN ISLAM - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur	9	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; dan analisis laporan keuangan instansi.	
584	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
585	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV KEUANGAN PUBLIK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Subbagian Umum dan Tata Usaha	9	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam penyelesaian tagihan, akurasi penerbitan SPM, kualitas data rekening supplier serta mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengawasan keuangan negara di Direktorat Jenderal Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
586	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan Seksi Penyelenggaraan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi	
587	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang Seksi Penyelenggaraan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi	
588	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta Seksi Penyelenggaraan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi	
589	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	LULUSAN TERBAIK	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Seksi Penyelenggaraan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi	
590	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Seksi Penyelenggaraan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi	
591	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	LULUSAN TERBAIK	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi	
592	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi	
593	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	PENYANDANG DISABILITAS	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi	
594	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
595	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi	
596	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas pelaksanaan kegiatan manajemen PNS untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.	
597	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan	
598	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi	
599	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Penilaian Kompetensi Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi	
601	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Bagian Administrasi Akademik dan Umum Subbagian Keuangan dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan	
602	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan	
603	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
604	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Bidang Kepatuhan Intern	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi	
605	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Bidang Pemetaan Karier	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan	
606	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Bidang Pemetaan Karier	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan	
607	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
608	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan	
609	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan	
610	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
611	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
612	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
613	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.	
614	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
615	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Bagian Kepegawaian dan Umum	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.	
616	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Bahan Jalan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
617	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
618	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV SISTEM INFORMASI - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
619	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
620	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
621	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
622	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV SISTEM INFORMASI - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
623	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
624	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
625	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
626	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
627	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
628	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV SISTEM INFORMASI - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
629	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jalan dan Pengembangan Profesi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
630	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pengadaan Tanah	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
632	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
633	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV SISTEM INFORMASI - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
634	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Kepegawaian dan Umum	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
635	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
636	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
637	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
638	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
639	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
641	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
642	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
643	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
644	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
645	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
646	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
647	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
649	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
650	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
651	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
652	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
653	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
654	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
655	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
656	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
657	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
658	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
659	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
660	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
661	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
662	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
663	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
664	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
665	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
666	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Sains Bangunan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
667	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Air Minum Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
668	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
669	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
670	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
671	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Permukiman dan Pengembangan Profesi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
673	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
674	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
675	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
676	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	
677	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
678	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Kepegawaian dan Umum	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen Cipta Karya	
679	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	
680	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Kepegawaian dan Umum	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	
682	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
683	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
685	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
687	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
689	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
690	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
691	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
693	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
694	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
695	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
696	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
697	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
698	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
699	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
700	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
701	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
702	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
703	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
704	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
705	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
706	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
707	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
708	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Kepegawaian dan Umum	9	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Perumahan	
709	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
710	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
711	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
713	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
714	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
715	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
716	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
717	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
718	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
719	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
720	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
721	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
722	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
723	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
724	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Irigasi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
725	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Pantai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
726	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Rawa SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
728	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sungai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
729	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
730	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
731	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
733	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
734	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
735	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
736	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
738	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
739	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
740	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
741	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
743	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
744	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
745	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
746	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
747	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
748	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
749	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
750	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
751	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
753	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
754	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
755	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan SUBBAGIAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
756	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
758	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
759	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
760	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
761	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
762	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
763	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Tata Usaha SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
764	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Tata Usaha SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
765	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
766	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Sekretariat Jenderal BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
768	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
769	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
770	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Keuangan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi	
771	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara SUBBAGIAN TATA USAHA	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
772	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Analis SDM Aparatur bertugas melakukan pengelolaan sistem sumber daya manusia aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik sumber daya manusia profesional mutakhir	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
773	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan SUBBAGIAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	
774	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
775	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV KEARSIPAN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
776	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
777	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
778	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN -	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
779	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV KEARSIPAN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang	
780	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN -	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan BIDANG DUKUNGAN TEKNIS PIMPINAN	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pelayanan tata persuratan dan kearsipan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	
782	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
783	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Bagian Manajemen Perkantoran dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan di bidang kearsipan dalam hal pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
785	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
787	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan di bidang kearsipan dalam hal pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.	
788	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
789	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
790	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
792	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
793	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN -	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
794	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
796	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
797	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
798	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Subbagian Umum dan Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
799	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
800	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV SAINS DATA TERAPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 LOGISTIK - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN							
801	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
802	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah I	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
803	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Minum Subdirektorat Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
804	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah I	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
805	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
806	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
807	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV KEARSIPAN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang	
808	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
809	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
810	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Klinik Utama Kementerian PUPR ADMINISTRASI TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Pertama Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
811	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
812	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV KEARSIPAN - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
813	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Khusus	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
814	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
815	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subbagian Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
816	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
817	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Subbagian Umum dan Tata Usaha	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
818	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
819	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Subbagian Umum dan Tata Usaha	10	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
820	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
821	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
822	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
823	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Subbagian Umum dan Tata Usaha	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
824	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
825	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Subbagian Umum dan Tata Usaha	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
826	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
827	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
828	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
829	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
830	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV KEARSIPAN - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Sub Bagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
831	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
832	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
833	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
834	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
835	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
836	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
837	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
838	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Kepegawaian dan Umum	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
839	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
840	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
841	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV SAINS DATA TERAPAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 LOGISTIK - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN							
842	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
843	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
844	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
845	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
846	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
847	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
848	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
849	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
850	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
852	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
854	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
856	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
857	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
858	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
859	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Kepegawaian dan Umum	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
860	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV KEARSIPAN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang	
861	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV	10	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
862	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
863	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Air Minum Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
864	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
865	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV KEARSIPAN - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
866	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
867	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
868	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV SAINS DATA TERAPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS - D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
869	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
870	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
871	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
872	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
873	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
874	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
875	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subbagian Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
876	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
877	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
878	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Subbagian Umum dan Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
879	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Subbagian Umum dan Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
880	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Subbagian Umum dan Tata Usaha	9	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
881	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
882	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV KEARSIPAN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
883	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV SAINS DATA TERAPAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN - D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 LOGISTIK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 ILMU INFORMASI - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
884	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
885	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	11	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
886	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV KEARSIPAN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Penilaian Kompetensi Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
887	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
888	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
889	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV KEARSIPAN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
890	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Subbagian Umum dan Tata Usaha	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
891	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
892	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
893	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
894	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
895	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Sains Bangunan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
896	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
897	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
898	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Subbagian Umum dan Tata Usaha	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
899	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
901	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subbagian Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
902	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
903	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
904	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
905	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
906	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	LULUSAN TERBAIK	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Bidang Pemetaan Karier	2	Rp9.600.000	Rp10.200.000	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	
907	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Bidang Pemetaan Karier	4	Rp9.600.000	Rp10.200.000	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
908	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Bidang Pemetaan Karier	1	Rp9.600.000	Rp10.200.000	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	
909	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat I	1	Rp9.600.000	Rp10.200.000	Melaksanakan kegiatan pengawasan intern, yaitu mengidentifikasi data/informasi dalam pelaksanaan penugasan assurance, melaksanakan penugasan consulting terkait audit intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang serta mengidentifikasi data/bahan terkait perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.	
910	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ILMU HUKUM	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat I	1	Rp9.600.000	Rp10.200.000	Melaksanakan kegiatan pengawasan intern, yaitu mengidentifikasi data/informasi dalam pelaksanaan penugasan assurance, melaksanakan penugasan consulting terkait audit intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang serta mengidentifikasi data/bahan terkait perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.	
911	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ILMU HUKUM	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat II	1	Rp9.600.000	Rp10.200.000	Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan intern, yaitu menganalisis data/informasi dalam pelaksanaan kegiatan assurance, melaksanakan kegiatan consulting terkait audit intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi, menganalisis isu strategis terkait perencanaan dan evaluasi pengawasan serta menyusun konsep laporan Berkala Hasil Pengawasan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
912	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat II	1	Rp9.600.000	Rp10.200.000	Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan intern, yaitu menganalisis data/informasi dalam pelaksanaan kegiatan assurance, melaksanakan kegiatan consulting terkait audit intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi, menganalisis isu strategis terkait perencanaan dan evaluasi pengawasan serta menyusun konsep laporan Berkala Hasil Pengawasan.	
913	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat III	1	Rp9.600.000	Rp10.200.000	Melaksanakan kegiatan pengawasan intern, yaitu mengidentifikasi data/informasi dalam pelaksanaan penugasan assurance, melaksanakan penugasan consulting terkait audit intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang serta mengidentifikasi data/bahan terkait perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.	
914	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ILMU HUKUM	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat III	1	Rp9.600.000	Rp10.200.000	Melaksanakan kegiatan pengawasan intern, yaitu mengidentifikasi data/informasi dalam pelaksanaan penugasan assurance, melaksanakan penugasan consulting terkait audit intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang serta mengidentifikasi data/bahan terkait perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
915	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ILMU HUKUM	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Inspektorat Jenderal Inspektorat IV	1	Rp9.600.000	Rp10.200.000	Melaksanakan kegiatan pengawasan intern, yaitu mengidentifikasi data/informasi dalam pelaksanaan penugasan assurance, melaksanakan penugasan consulting terkait audit intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang serta mengidentifikasi data/bahan terkait perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.	
916	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ILMU HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Inspektorat Jenderal Inspektorat V	1	Rp9.600.000	Rp10.200.000	Melaksanakan kegiatan pengawasan intern, yaitu mengidentifikasi data/informasi dalam pelaksanaan penugasan assurance, melaksanakan penugasan consulting terkait audit intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang serta mengidentifikasi data/bahan terkait perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.	
917	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ILMU HUKUM	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat V	1	Rp9.600.000	Rp10.200.000	Melaksanakan kegiatan pengawasan intern, yaitu mengidentifikasi data/informasi dalam pelaksanaan penugasan assurance, melaksanakan penugasan consulting terkait audit intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang serta mengidentifikasi data/bahan terkait perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
918	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh Seksi Pelaksanaan	10	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	
919	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Seksi Pelaksanaan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
920	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Seksi Pelaksanaan	9	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	
921	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Seksi Pelaksanaan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
922	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Seksi Pelaksanaan	9	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
923	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Seksi Pelaksanaan	10	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
924	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Seksi Pelaksanaan	10	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Seksi Pelaksanaan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Seksi Pelaksanaan	11	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
927	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura Seksi Pelaksana	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
928	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura Seksi Pelaksana	10	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
929	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
930	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
931	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan dan Usaha Jasa Konstruksi	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
932	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
933	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
934	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
936	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Subdirektorat Kontrak Konstruksi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
937	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Subdirektorat Kontrak Konstruksi	8	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
938	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	9	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
939	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV HUKUM - D-IV EKONOMI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 EKONOMI - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 GEOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Bagian Administrasi	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
942	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan, dan Evaluasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
943	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
944	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
945	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
946	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subdirektorat Wilayah I	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
947	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
948	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
949	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III	13	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
950	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
951	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	18	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
952	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
953	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
954	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
955	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Seksi Pelaksanaan Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
956	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
957	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
958	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah I	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
959	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	9	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
961	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
962	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
963	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
964	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Seksi Pelaksanaan Wilayah I	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
965	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
966	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
967	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
968	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
969	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Seksi Pelaksanaan Wilayah I	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
970	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	12	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
971	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
972	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
973	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur	11	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
974	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
975	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
976	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Seksi Pelaksanaan Wilayah II	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
977	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
978	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Seksi Pelaksanaan Wilayah II	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
979	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Seksi Pelaksanaan Wilayah I	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
980	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Subdirektorat Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
981	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Seksi Pelaksanaan Wilayah II	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
982	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Seksi Pelaksanaan Wilayah II	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
983	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung Seksi Pelaksana Wilayah I	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
984	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
985	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
986	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
987	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
989	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV	15	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
990	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Seksi Pelaksanaan Wilayah II	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
991	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penatakelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
992	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Seksi Pelaksana Wilayah I	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
993	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Seksi Pelaksana Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
994	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Seksi Pelaksanaan Wilayah I	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggaan	
995	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II	12	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggaan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
996	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
997	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
998	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	15	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
999	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya	14	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1002	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1004	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penatakelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman	
1005	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara	16	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							
1006	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman di dalam cakupan pengembangan kewilayahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1007	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penatakelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman	
1008	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundangan	
1009	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1011	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1012	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundangan	
1013	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1015	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1016	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1017	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1018	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1019	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1020	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1021	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1022	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1023	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Khusus	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1024	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1025	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundangan	
1026	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1027	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subdirektorat Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1028	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subdirektorat Perencanaan Teknis Prasarana Strategis	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1029	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1030	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1031	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1032	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1033	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1034	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1035	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1036	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1037	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1038	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1039	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1040	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1041	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1042	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1043	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1044	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1045	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1046	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1047	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Seksi Pelaksanaan Wilayah II	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1048	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	21	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1049	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Sains Bangunan	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1050	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1051	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan strategi pengembangan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman	
1052	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Seksi Pelaksana Wilayah II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1053	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1054	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	11	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							
1055	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan strategi pengembangan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1056	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1057	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Seksi Pelaksanaan Wilayah II	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundangan	
1058	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1059	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1060	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Seksi Pelaksana Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1061	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1062	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Seksi Pelaksana Wilayah II	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1063	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							
1064	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Keterpaduan Program	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Menyusun strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1065	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1066	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1067	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1068	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Khusus	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundangan	
1069	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subdirektorat Perencanaan Teknis Prasarana Strategis	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1070	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah II	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggaan	
1071	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggaan	
1072	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 TEKNIK SIPIL PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik BAGIAN PELAPORAN PIMPINAN DAN PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	melaksanakan penatakelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1073	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1074	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Seksi Pelaksana Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1075	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1076	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1077	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah II	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1078	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1079	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah I	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1080	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1081	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah III	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggaan	
1082	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II	9	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggaan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1083	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1084	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah I	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1085	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1086	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Seksi Pelaksana Wilayah II	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1087	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1088	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1089	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1090	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1091	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan Penatakelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1092	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1093	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Permukiman dan Pengembangan Profesi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1094	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1095	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1096	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1097	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Seksi Pelaksana Wilayah II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1098	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah II	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1099	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Seksi Pelaksanaan Wilayah II	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1100	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1102	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	22	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggaan	
1103	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Seksi Pelaksana Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1104	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subdirektorat Wilayah II	15	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1105	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III	15	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundangan	
1106	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1107	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI -	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan	
1108	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Seksi Pelaksanaan Wilayah II	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	
1109	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundaggan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundangan	
1111	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1112	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan-perundangan	
1113	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK FISIKA - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK LISTRIK - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA ELEKTRO - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA FISIKA - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA							
1114	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	pengkajian dan penyusunan rencana jaringan jalan, jembatan, atau terowongan penyusunan prastudi kelayakan dan studi kelayakan pengembangan jalan;"	
1116	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan melalui metode pendekatan pengembangan wilayah	
1117	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan melalui metode pendekatan pengembangan wilayah	
1118	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Kepatuhan Intern	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melakukan kajian dan menyusun rencana jaringan jalan, jembatan atau terowongan serta menyusun prastudi kelayakan dan studi kelayakan pengembangan jalan, jembatan atau terowongan	
1119	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Keterpaduan Program	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melakukan kajian dan menyusun rencana jaringan jalan, jembatan atau terowongan serta menyusun prastudi kelayakan dan studi kelayakan pengembangan jalan, jembatan atau terowongan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1120	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Bahan Jalan	11	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELASAN DAN FABRIKASI - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KELAUTAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA KELAUTAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA KELAUTAN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1121	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1122	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1123	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bidang Preservasi I	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1124	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bidang Preservasi II	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1125	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 REKAYASA SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I .Yogyakarta Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1126	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 REKAYASA SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I .Yogyakarta Bidang Preservasi I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1127	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 REKAYASA SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I .Yogyakarta Bidang Preservasi II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1128	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1129	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1130	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bidang Preservasi I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1131	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bidang Preservasi II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1132	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA KELAUTAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ARSITEKTUR - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 RANCANG KOTA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV JASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Bidang Preservasi	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1134	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1135	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1136	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bidang Preservasi I	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1137	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bidang Preservasi II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1138	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV REKAYASA GEODESI -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1139	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Jembatan	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1140	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1141	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1142	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Seksi Preservasi	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1143	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1144	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1145	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV GEOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1146	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV GEOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1147	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV GEOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1148	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1149	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Seksi Preservasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1150	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S 1 PERENCANAAN WILAYAH							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1151	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV GEOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1152	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV GEOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Seksi Preservasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1153	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1154	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1155	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1156	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1157	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1158	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Seksi Preservasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1159	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA GEODESI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1160	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV REKAYASA GEODESI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 GEOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1161	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV GEOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV REKAYASA GEODESI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 GEOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Seksi Preservasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1162	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1163	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah Seksi Preservasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1164	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1165	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1166	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara Seksi Preservasi	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1167	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1168	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV MANAJEMEN PROJEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1169	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Seksi Preservasi	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1170	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 GEOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA GEOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1171	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1172	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Seksi Preservasi	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1173	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1174	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1175	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1176	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1177	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara Seksi Preservasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1178	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1179	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1180	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1181	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1182	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S 1 PERENCANAAN WILAYAH							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1183	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1184	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1185	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1186	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 RANCANG KOTA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1187	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELASAN DAN FABRIKASI - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA KELAUTAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA KELAUTAN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1188	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 REKAYASA SIPIL	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1189	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1190	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Seksi Persevasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1191	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1192	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELASAN DAN FABRIKASI - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KELAUTAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA KELAUTAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DAN PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA KELAUTAN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1193	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1194	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1195	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Seksi Preservasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1196	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELASAN DAN FABRIKASI - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1197	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1198	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1199	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Seksi Preservasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1200	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1201	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1202	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1203	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK KELAUTAN - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA KELAUTAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pengadaan Tanah	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI							
1204	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1205	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1206	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jalan Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1207	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jalan Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1208	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jalan Subdirektorat Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1209	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jalan Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1210	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jalan Subdirektorat Wilayah III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1211	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jembatan Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1212	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jembatan Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1213	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jembatan Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1214	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jembatan Subdirektorat Wilayah III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1215	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1217	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Subdirektorat Wilayah I.A	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1218	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Subdirektorat Wilayah I.B	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1219	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Subdirektorat Wilayah I.C	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Subdirektorat Wilayah II.A	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1222	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Subdirektorat Wilayah II.B	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1223	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Subdirektorat Wilayah II.C	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	
1224	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Subdirektorat Jalan Daerah	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1225	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Subdirektorat Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1226	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV MANAJEMEN PROJEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1227	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS -	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV MANAJEMEN PROJEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1228	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK GEOLOGI - D-IV TEKNIK MATERIAL - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV TEKNIK PLANOLOGI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV TEKNIK METALURGI - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV REKAYASA MATERIAL - D-IV REKAYASA MESIN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR - D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV REKAYASA GEODESI - D-IV REKAYASA GEOLOGI - D-IV REKAYASA GEOMATIKA - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV REKAYASA METALURGI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-IV MANAJEMEN PROJEK KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN - S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN -							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 TEKNIK METALURGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 RANCANG KOTA - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 REKAYASA GEODESI - S-1 REKAYASA GEOMATIKA - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA METALURGI - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI - S-1 REKAYASA GEOLOGI							
1229	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan Perencanaan umum jalan dan jembatan, Perencanaan teknis jalan dan jembatan, Pelaksanaan jalan dan jembatan, pengawasan jalan dan jembatan dan pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan.	
1230	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Pelaksana teknis fungsional kegiatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pemerintah	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1231	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik BAGIAN PELAPORAN PIMPINAN DAN PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Pengkajian dan penyusunan rencana jaringan jalan, jembatan, atau terowongan Penyiapan rekomendasi teknis untuk preservasi dan pembangunan jalan, jembatan, atau terowongan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan bagian-bagian jalan	
1232	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah BIDANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS JALAN DAN JEMBATAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyusunan arah kebijakan DAK Bidang jalan dan jembatan; pembinaan perencanaan dan penganggaran DAK Bidang jalan dan jembatan; pembinaan pemantauan, evaluasi, pelaporan DAK Bidang jalan dan jembatan.	
1233	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN -	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN							
1234	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1235	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung Seksi Pelaksana Wilayah II	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1236	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1237	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1238	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1239	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1240	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1241	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1242	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1243	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	11	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1244	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Seksi Pelaksana Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1245	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Seksi Pelaksana Wilayah II	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1246	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1247	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1248	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1249	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1250	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat	11	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1251	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Seksi Pelaksana Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1252	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Seksi Pelaksana Wilayah II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1253	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1254	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Seksi Pelaksana Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1255	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	11	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1256	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Seksi Pelaksana Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1257	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Seksi Pelaksana Wilayah II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1258	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1259	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Seksi Pelaksana Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1261	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Seksi Pelaksana Wilayah II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1262	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1263	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1264	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1265	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1266	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1267	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1268	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1269	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Seksi Pelaksana Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1270	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Seksi Pelaksana Wilayah II	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1271	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1272	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1273	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1274	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1275	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1276	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1277	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Seksi Pelaksana Wilayah II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1278	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1279	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1280	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1281	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1282	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1283	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1284	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1285	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1286	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1287	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1288	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1289	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1290	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1291	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara	16	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1292	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Seksi Pelaksana Wilayah I	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1293	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Seksi Pelaksana Wilayah II	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1294	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Sains Bangunan	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1295	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Air Minum	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1296	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1297	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1298	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1299	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Permukiman dan Pengembangan Profesi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1301	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1302	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1303	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1304	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Sanitasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1305	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Sanitasi	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1306	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1307	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subdirektorat Wilayah I	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1308	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subdirektorat Wilayah II	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1309	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subdirektorat Wilayah III	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN -	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1311	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan, dan Evaluasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1312	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1313	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1314	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1315	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-IV REKAYASA SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN - D-IV REKAYASA LINGKUNGAN - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL - D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan.	
1316	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Menyelenggarakan penatakelolaan penyehatan lingkungan	
1317	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyelenggarakan penatakelolaan penyehatan lingkungan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1318	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Subdirektorat Kepatuhan Intern	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyelenggarakan penatakelolaan penyehatan lingkungan	
1319	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah BIDANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyusunan arah kebijakan DAK Bidang air minum dan sanitasi; pembinaan perencanaan dan penganggaran DAK Bidang air minum dan sanitasi; pembinaan pemantauan, evaluasi, pelaporan DAK Bidang air minum dan sanitasi; dan pembinaan pemantauan, evaluasi, pelaporan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1320	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan dan perencanaan penyelenggaraan manajemen perumahan di dalam cakupan pengembangan kewilayahan	
1321	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan; perencanaan penyelenggaraan manajemen perumahan"	
1322	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Kepatuhan Intern	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Perencanaan penyelenggaraan bidang penatakelolaan perumahan	
1323	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Pengaturan, Perencanaan Pembinaan, Pemberdayaan, Penyelenggaraan Manajemen Perumahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1324	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1325	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1326	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	32	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1327	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ILMU KOMPUTER - D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU EKONOMI - D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN - D-IV ARSITEKTUR - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV ADMINISTRASI BISNIS - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV KEUANGAN DAN PERBANKAN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - D-IV ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		NEGARA - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK							
1328	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1329	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1330	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1331	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II	28	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1332	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1333	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1334	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1335	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III	12	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1336	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1337	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Seksi Pelaksanaan Wilayah I	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1338	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1339	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Seksi Pelaksanaan Wilayah II	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1340	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1341	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1342	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV	13	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1343	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1344	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Seksi Pelaksanaan Wilayah I	11	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1345	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1346	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Seksi Pelaksanaan Wilayah II	9	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1347	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1348	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1349	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I	15	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1350	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1351	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1352	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1353	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1354	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1355	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1356	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1357	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1358	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II	36	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1359	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1360	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1361	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1362	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Seksi Pelaksanaan Wilayah II	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1363	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1364	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1365	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1366	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1367	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku	15	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1368	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1369	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Seksi Pelaksanaan Wilayah I	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1370	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1371	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Seksi Pelaksanaan Wilayah II	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1372	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1373	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1374	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1375	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1376	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	14	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1377	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1378	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1379	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1380	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1381	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	14	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1382	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1383	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1384	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1385	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I	9	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1386	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV PLANOLOGI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1387	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV PLANOLOGI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1388	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1389	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1390	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1391	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1392	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1393	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1394	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1395	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1396	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1397	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1398	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1399	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I	18	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1400	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1401	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1402	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1403	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1404	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1405	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1406	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	14	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1407	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1408	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1409	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Seksi Pelaksanaan Wilayah II	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1411	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1412	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1413	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1414	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III	14	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1415	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Seksi Pelaksanaan Wilayah I	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1417	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Seksi Pelaksanaan Wilayah II	9	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1418	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1419	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1420	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1421	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I	9	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1422	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1423	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Seksi Pelaksanaan Wilayah I	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1424	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1425	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Seksi Pelaksanaan Wilayah II	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1426	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1427	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1428	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1429	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II	24	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1430	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1431	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Seksi Pelaksanaan Wilayah I	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1432	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1433	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Seksi Pelaksanaan Wilayah II	9	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1434	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1435	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1436	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1437	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	44	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1438	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1439	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Seksi Pelaksanaan Wilayah I	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1440	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1441	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Seksi Pelaksanaan Wilayah II	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1442	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1443	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1444	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1445	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV	15	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1446	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1447	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Seksi Pelaksanaan Wilayah I	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1448	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1449	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Seksi Pelaksanaan Wilayah II	6	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1450	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1451	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1452	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1453	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	38	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1454	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Seksi Pelaksanaan Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1455	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Seksi Pelaksanaan Wilayah I	7	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1456	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Seksi Pelaksanaan Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1457	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Seksi Pelaksanaan Wilayah II	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1458	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1459	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1460	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1461	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	22	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1462	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 PLANOLOGI	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1463	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1464	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Khusus	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1465	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Khusus	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1466	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Khusus	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1467	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1468	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah I	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1469	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1470	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1471	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah II	9	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1472	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1473	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1474	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Wilayah III	9	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1475	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1476	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1477	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1478	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1479	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah I	10	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1480	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1481	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1482	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah II	9	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1483	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1484	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah III	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1485	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah III	9	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1486	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1487	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya	14	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1488	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1489	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Wilayah I	14	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1490	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1491	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Wilayah II	14	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1492	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1493	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1494	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1495	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial	16	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1496	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1497	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1498	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah I	15	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1499	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1500	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah II	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1501	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah II	11	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1502	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1503	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1504	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1505	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1506	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1507	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1508	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan	13	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1509	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	9	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1511	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1512	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1513	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	8	Rp9.400.000	Rp10.000.000	1. mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penatakelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota;	
1514	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Penyelenggaraan penataan ruang di dalam cakupan pengembangan kewilayahan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1515	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan pengumpulan data dan informasi pemanfaatan ruang dan mengidentifikasi arahan pemanfaatan ruang	
1516	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Penyelenggaraan penataan ruang.	
1517	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Kepatuhan Intern	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Penyelenggaraan penataan ruang dalam pengembangan wilayah	
1518	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Keterpaduan Program	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Penyelenggaraan penataan ruang dalam pengembangan wilayah	
1519	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik BAGIAN PELAPORAN PIMPINAN DAN PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.	
1520	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1521	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1522	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1523	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1524	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1525	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1526	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1527	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1528	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1529	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi	11	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1530	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1531	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1532	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1533	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1534	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1535	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1536	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat	10	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1537	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1538	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1539	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1540	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1541	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1542	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1543	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1544	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1545	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1546	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1547	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku	8	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1548	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1549	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1550	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1551	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur	9	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1552	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1553	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua	14	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1554	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1555	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat	14	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1556	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1557	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1558	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1559	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1560	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan	7	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1561	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1562	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1563	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1564	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1565	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1566	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1567	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat	9	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1568	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan	10	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1569	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset	
1570	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan program teknis bidang Sumber Daya Air	
1571	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	penyusunan program teknis bidang Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1572	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan program teknis bidang Sumber Daya Air	
1573	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Kepatuhan Intern	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan program teknis bidang Sumber Daya Air	
1574	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Keterpaduan Program	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Menyusun program teknis bidang Sumber Daya Air	
1575	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka pembiayaan infrastruktur sumber daya air yang meliputi pengembangan teknologi, pengelolaan, perencanaan pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta penyuluhan terkait dengan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
1576	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 PLANOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka pembiayaan infrastruktur sumber daya air yang meliputi pengembangan teknologi, pengelolaan, perencanaan pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta penyuluhan terkait dengan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1577	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 GEOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1578	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1579	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1580	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1581	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1582	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1583	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1584	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1585	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1586	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1587	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1588	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1589	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1590	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1591	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1592	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1593	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1594	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1595	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1596	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1597	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1598	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1599	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1600	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BIDANG PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1601	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1602	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bidang Operasi dan Pemeliharaan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1603	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1604	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1605	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1606	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1607	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1608	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1609	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1611	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1612	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1613	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1614	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1615	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1616	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1617	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1618	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1619	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1620	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1621	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1622	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bidang Operasi dan Pemeliharaan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1623	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1624	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1625	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1626	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1627	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SEKSI KAJIAN BENDUNGAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1628	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SEKSI PEMANTAUAN BENDUNGAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1629	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SEKSI PROGRAM, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1630	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Irigasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1631	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Pantai	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
1632	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Rawa	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1633	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1634	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sungai	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1635	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1636	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1637	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1638	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1639	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1640	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1641	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1642	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1643	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1644	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1645	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1646	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1647	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1648	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1649	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1650	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1651	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1652	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1653	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1654	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1655	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1656	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1657	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1658	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1659	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1660	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1661	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1662	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1663	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1664	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1665	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1666	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1667	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1668	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1669	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1670	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1671	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1672	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1673	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1674	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1675	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1676	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1677	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1678	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1679	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1680	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1681	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1682	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1683	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1684	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1685	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1686	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1687	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1688	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1689	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1690	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1691	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1692	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1693	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1694	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1695	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1696	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1697	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1698	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	16	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1699	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1700	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1701	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1702	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1703	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1704	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1705	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1706	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1707	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1708	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1709	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1711	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1712	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1713	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1714	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Wilayah II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1715	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Wilayah III	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1716	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1717	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Wilayah I	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1718	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Wilayah II	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1719	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Wilayah III	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1720	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1721	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Wilayah I	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1722	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Wilayah II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1723	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Wilayah III	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1724	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1725	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subdirektorat Keamanan Bangunan Air	5	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1726	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1727	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1728	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1729	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Wilayah I	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1730	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Wilayah II	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1731	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Wilayah III	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1732	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1733	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1734	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1735	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1736	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Keterpaduan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1737	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengadaan Tanah	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1738	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengadaan Tanah	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1739	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	4	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1740	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1741	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1742	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1743	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1744	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO -	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1745	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1746	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Wilayah II	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1747	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Wilayah III	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1748	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bidang Operasi dan Pemeliharaan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1749	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bidang Pelaksanaan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1750	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bidang Perencanaan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1751	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bidang Perencanaan	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1752	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Penyusun Program dan Pelaporan SUBBAGIAN MATERI SIDANG DAN PELAPORAN	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1753	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK BANGUNAN RAWA - S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 TEKNIK BANGUNAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Penyusun Program dan Pelaporan SUBBAGIAN PENYUSUN PROGRAM	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	
1754	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik BAGIAN PELAPORAN PIMPINAN DAN PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Penyusunan program teknis bidang umber Daya Air;	
1755	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah BIDANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan penyusunan arah kebijakan DAK Bidang Sumber Daya Air; pembinaan perencanaan dan penganggaran DAK Bidang Sumber Daya Air; pembinaan pemantauan, evaluasi, pelaporan DAK Bidang Sumber Daya Air.	
1756	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1757	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA	LULUSAN TERBAIK	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran	
1758	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran	
1759	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran	
1760	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik	1	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya	
1761	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi dan Komunikasi Publik	1	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	
1762	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi dan Komunikasi Publik	1	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	
1763	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	2	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
1764	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1765	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	2	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
1766	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	2	Rp9.500.000	Rp10.100.000	melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	
1767	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	2	Rp9.500.000	Rp10.100.000	melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	
1768	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	
1769	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	
1770	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	7	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	
1771	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1772	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
1773	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	2	Rp9.500.000	Rp10.100.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
1774	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	LULUSAN TERBAIK	Sekretariat Jenderal Biro Hukum BAGIAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN KEPATUHAN INTERN	2	Rp9.500.000	Rp10.100.000	melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	
1775	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Hukum BAGIAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN KEPATUHAN INTERN	4	Rp9.500.000	Rp10.100.000	melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	
1776	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I A	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1777	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I A	
1778	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I B	
1779	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I C	
1780	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I C	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1781	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II A	
1782	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II B	
1783	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II C	
1784	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III A	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1785	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B	
1786	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B	
1787	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	LULUSAN TERBAIK	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Keterpaduan Program	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah	
1788	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Keterpaduan Program	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah	
1789	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Keterpaduan Program	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1790	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan, pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pengendalian, pemantauan, dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.	
1791	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan tugas teknis perencanaan, pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pengendalian, pemantauan, dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan	
1792	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	
1793	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	
1794	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1795	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura Seksi Penyelenggaraan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	
1796	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	PUTRA/PUTRI PAPUA	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	
1797	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	
1798	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	
1799	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Penilaian Kompetensi Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	
1800	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1801	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Bidang Pemetaan Karier	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	
1802	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	
1803	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 GEODESI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I .Yogyakarta Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1804	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 GEODESI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I .Yogyakarta Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1805	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU HUKUM	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1806	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEODESI - S-1 PLANOLOGI - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1807	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEODESI - S-1 PLANOLOGI - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1808	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1809	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PLANOLOGI - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1810	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PLANOLOGI - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1811	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV ANALISIS KEUANGAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1812	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 PLANOLOGI - S-1 STUDI PEMBANGUNAN - S-1 ARSITEK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1813	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 STUDI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pengadaan Tanah	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1814	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1815	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 GEODESI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP - S-1 ARSITEK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Subdirektorat Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1816	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1817	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1818	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1819	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1820	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1821	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1822	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1823	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1824	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1825	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1826	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1827	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1828	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1829	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1830	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1831	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1832	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1833	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1834	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1835	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1836	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1837	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1838	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Seksi Pelaksana Wilayah I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1839	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1840	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1841	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1842	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1843	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1844	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1845	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Seksi Pelaksana Wilayah II	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1846	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Air Minum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1847	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1848	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Minum Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1849	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1850	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1851	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1852	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1853	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1854	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subdirektorat Perencanaan Teknis Prasarana Strategis	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1855	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Sanitasi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1856	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Sanitasi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
1857	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 MANAJEMEN KEUANGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
1858	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Direktorat Jenderal Perumahan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1859	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Khusus	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Direktorat Jenderal Perumahan.	
1860	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Direktorat Jenderal Perumahan.	
1861	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Direktorat Jenderal Perumahan.	
1862	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Direktorat Jenderal Perumahan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1863	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Direktorat Jenderal Perumahan.	
1864	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Direktorat Jenderal Perumahan.	
1865	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Direktorat Jenderal Perumahan.	
1866	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Direktorat Jenderal Perumahan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1867	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Direktorat Jenderal Perumahan.	
1868	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	LULUSAN TERBAIK	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Direktorat Jenderal Perumahan.	
1869	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Direktorat Jenderal Perumahan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1870	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1871	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1872	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1873	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1874	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1875	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1876	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1877	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1878	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 MANAJEMEN KEUANGAN - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1879	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1880	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1881	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1882	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1883	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1884	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1885	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 ILMU PERTANIAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SEKSI PROGRAM, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1886	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 PERTANIAN BERKELANJUTAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Pantai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1887	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 STATISTIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 GEOGRAFI - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Rawa SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1888	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1889	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 PERTANIAN BERKELANJUTAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1890	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1891	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1892	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1893	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1894	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1895	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1896	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1897	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1898	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1899	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1900	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1901	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1902	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1903	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1904	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1905	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1906	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1907	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1908	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1909	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1910	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1911	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1912	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1913	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1914	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1915	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 MANAJEMEN KEUANGAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 GEOGRAFI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1916	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 MANAJEMEN KEUANGAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 GEOGRAFI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1918	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1919	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1920	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1921	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 MANAJEMEN KEUANGAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 GEOGRAFI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1922	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1923	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 MANAJEMEN KEUANGAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 GEOGRAFI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bidang Perencanaan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	
1924	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ADMINISTRASI - S-1 STATISTIK - S-1 GEOGRAFI - S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Penyusun Program dan Pelaporan SUBBAGIAN PENYUSUN PROGRAM	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1925	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 PLANOLOGI - S-1 STUDI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Bagian Administrasi Penganggaran	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan terkait rencana kerja, rencana program dan kegiatan Jangka Menengah Kementerian PUPR, rencana program dan kegiatan Prioritas Nasional Bidang PUPR	
1926	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 PLANOLOGI - S-1 STUDI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Bagian Kerja Sama Luar Negeri	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan terkait penyiapan koordinasi rencana, program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri, administrasi kerja sama luar negeri, diantaranya pinjaman dan hibah luar negeri, kerja sama teknik internasional, penugasan dan perizinan tenaga ahli warga negara asing, serta perjalanan dinas luar negeri	
1927	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 HUKUM - S-1 PLANOLOGI - S-1 STUDI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan terkait penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal, penyiapan pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan anggaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1928	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah BIDANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS JALAN DAN JEMBATAN	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan penyusunan arah kebijakan DAK Fisik Infrastruktur; pembinaan perencanaan dan penganggaran DAK Fisik Infrastruktur; pembinaan pemantauan, evaluasi, pelaporan DAK Fisik Infrastruktur; dan pembinaan pemantauan, evaluasi, pelaporan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1929	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
1930	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
1931	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
1932	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Penilaian Kompetensi Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
1933	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Bagian Administrasi Akademik dan Umum Subbagian Administrasi Akademik dan Mahasiswa	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1934	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
1935	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
1936	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
1937	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1938	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1939	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1940	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1941	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1942	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1943	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1944	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1945	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1946	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1947	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1948	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1949	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1950	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1951	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1952	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1953	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1954	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1955	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1956	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1957	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1958	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1959	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1960	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1961	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1962	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1963	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1964	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1965	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1966	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1967	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1968	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1969	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1970	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1971	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Bagian Administrasi	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
1972	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 PERIKLANAN - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
1973	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 PERIKLANAN - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1974	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 PERIKLANAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
1975	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 PERIKLANAN - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1976	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 PERIKLANAN - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
1977	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 PERIKLANAN - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1978	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 PERIKLANAN - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
1979	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 PERIKLANAN - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
1981	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 FILM - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
1982	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 PERIKLANAN - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1983	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
1984	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 FILM - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
1985	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 PERIKLANAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1986	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
1987	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
1988	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1989	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
1990	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
1991	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1992	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
1993	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
1994	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1995	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
1996	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
1997	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1998	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
1999	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2000	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2002	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
2003	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2004	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2005	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2006	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2007	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2008	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2009	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2011	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2012	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2014	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2015	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2017	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2018	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Sains Bangunan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Air Minum Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2020	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2021	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Minum Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan	
2023	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2024	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2026	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Prasarana Strategis Subdirektorat Perencanaan Teknis Prasarana Strategis	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2027	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2028	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2029	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Cipta Karya	
2030	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2031	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2032	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2033	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2034	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2035	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2036	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2037	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2038	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2039	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2040	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2041	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2042	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2043	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2044	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2045	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2046	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2047	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2048	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2049	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2050	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2051	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2052	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2053	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2054	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2055	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau- Cijung-Cidurian BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2056	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2057	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2058	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2059	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2060	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2061	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2062	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2063	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2064	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2065	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2066	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2067	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2068	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Irigasi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2069	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Pantai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2070	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Rawa SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2071	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2072	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2073	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2074	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2075	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2076	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2077	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2078	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2079	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2080	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2081	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2082	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2083	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2084	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2085	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2086	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2087	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2088	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2089	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2090	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2091	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2092	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2093	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2094	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2095	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2096	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2097	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2098	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2099	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Tata Usaha SUBBAGIAN PELAYANAN PERSIDANGAN	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2100	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI MASSA - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan di Ditjen Sumber Daya Air	
2101	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 FILM - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
2102	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV DESAIN MEDIA - S-1 FILM - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	10	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2103	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Sekretariat Jenderal Biro Umum Bagian Keamanan dan Protokol	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.	
2104	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Bagian Keamanan dan Protokol	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.	
2105	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer di dalam bidang pengembangan wilayah	
2106	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer di dalam bidang pengembangan wilayah	
2107	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer di dalam bidang pengembangan wilayah	
2108	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bidang Keterpaduan Program	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dalam bidang pengembangan wilayah	
2109	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer di dalam bidang pengembangan wilayah	
2110	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2112	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya Seksi Penyelenggaraan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2113	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2114	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2115	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Bagian Administrasi Akademik dan Umum Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2116	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh Seksi Pelaksanaan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2117	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Seksi Pelaksanaan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2118	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Seksi Pelaksanaan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2119	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Seksi Pelaksanaan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2120	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Seksi Pelaksanaan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2121	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2122	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura Seksi Pelaksana	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2123	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2124	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2125	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2126	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2127	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2128	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2129	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2130	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2131	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2132	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2133	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2134	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2135	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2136	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2137	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2138	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2139	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2140	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2141	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2142	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2143	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2144	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2145	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2146	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2147	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2148	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2149	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2150	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2151	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2152	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2153	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2154	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2155	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2156	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2157	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2158	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2159	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Subbagian Tata Usaha	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2160	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2161	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2162	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Bagian Administrasi	8	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2163	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK - D-IV SISTEM SIBER-FISIK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
2164	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I .Yogyakarta Bagian Umum Dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
2165	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I .Yogyakarta Bidang Preservasi I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
2166	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I .Yogyakarta Bidang Preservasi II	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2167	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
2168	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF - D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN - D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK - D-IV SISTEM SIBER-FISIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2169	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF - D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN - D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK - D-IV SISTEM SIBER-FISIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
2170	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
2171	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2172	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
2173	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF - D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN - D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK - D-IV SISTEM SIBER-FISIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2174	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF - D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN - D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK - D-IV SISTEM SIBER-FISIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
2175	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV SISTEM SIBER-FISIK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2176	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV SISTEM SIBER-FISIK - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
2177	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Subdirektorat Wilayah I.B	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
2178	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2179	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Pranata Komputer Ahli Pertama bertugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2180	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Pranata Komputer Ahli Pertama bertugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2181	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Sains Bangunan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Pranata Komputer Ahli Pertama bertugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2182	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Air Minum	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Pranata Komputer Ahli Pertama bertugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2183	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Teknologi Air Minum Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Pranata Komputer Ahli Pertama bertugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2184	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Pranata Komputer Ahli Pertama bertugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2185	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas	
2186	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2187	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2188	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2189	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2190	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2191	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2192	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Subbagian Umum dan Tata Usaha	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2193	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2194	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2195	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2196	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2197	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2198	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2199	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2200	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2201	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2202	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2203	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2204	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2205	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2206	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2207	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2208	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2209	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subbagian Tata Usaha	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2210	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Khusus	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2211	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2212	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2213	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Susun Subdirektorat Wilayah I	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2214	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2215	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Subdirektorat Pembinaan Teknis Rumah Swadaya	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2216	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subbagian Tata Usaha	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2217	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2218	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Subdirektorat Wilayah I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2219	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2220	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2221	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2222	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2223	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Kepegawaian dan Umum	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2224	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	6	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	
2225	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2226	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2227	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2228	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau- Ciujung-Cidurian BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2229	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2231	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2232	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2233	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2234	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2235	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2236	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2237	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2238	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2239	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2240	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2241	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Irigasi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2242	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Pantai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2243	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Rawa SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2244	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2245	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2246	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2247	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2248	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2249	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2251	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2252	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2253	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2254	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2255	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2256	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2257	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2258	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2259	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2260	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2261	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2262	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2263	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2264	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2265	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2266	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2267	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2268	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2269	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2270	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan SUBBAGIAN TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2272	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2273	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2274	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2275	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2276	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2277	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2278	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subbagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2279	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bagian Tata Usaha	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2280	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2281	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Bagian Tata Usaha SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2282	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2283	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2284	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Kepegawaian dan Umum	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2285	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2286	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
2287	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Sekretariat Jenderal BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Pranata Komputer Ahli Pertama bertugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2288	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.	
2289	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik BAGIAN PELAPORAN PIMPINAN DAN PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan, dan/atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2290	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Fasilitas Pemanfaatan dan Penertiban Barang Milik Negara	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.	
2291	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Fasilitas Pemanfaatan dan Penertiban Barang Milik Negara	5	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.	
2292	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan di instansi pemerintah yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer	
2293	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Jabatan di instansi pemerintah yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer	
2294	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	jabatan di instansi pemerintah yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer	
2295	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Bagian Administrasi Penganggaran	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia terkait penyiapan koordinasi administrasi penganggaran Kementerian.	
2296	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Bagian Kerja Sama Luar Negeri	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia terkait penyiapan koordinasi rencana, program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri, administrasi kerja sama luar negeri, diantaranya pinjaman dan hibah luar negeri, kerja sama teknik internasional, penugasan dan perizinan tenaga ahli warga negara asing, serta perjalanan dinas luar negeri	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2297	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan anggaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal	
2298	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Bagian Manajemen Perkantoran dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Pranata Komputer Ahli Pertama bertugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2299	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Klinik Utama Kementerian PUPR ADMINISTRASI TATA USAHA	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Pranata Komputer Ahli Pertama bertugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
2300	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi BIDANG DATA DAN INFORMASI	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, inventarisasi data infrastruktur teknologi informasi dan layanan infrastruktur teknologi informasi.	
2301	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	DIASPORA	Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi BIDANG MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, inventarisasi data infrastruktur teknologi informasi dan layanan infrastruktur teknologi informasi.	
2302	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PENYANDANG DISABILITAS	Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi BIDANG MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, inventarisasi data infrastruktur teknologi informasi dan layanan infrastruktur teknologi informasi.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2303	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi BIDANG MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, inventarisasi data infrastruktur teknologi informasi dan layanan infrastruktur teknologi informasi.	
2304	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah BIDANG PERENCANAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer melalui tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia untuk meningkatkan mutu informasi digital	
2305	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK GEODESI - D-IV KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Bagian Administrasi Akademik dan Umum Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	3	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium	
2306	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Bagian Administrasi Akademik dan Umum Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan	
2307	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA - S-1 STATISTIKA - S-1 STATISTIKA TERAPAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan	1	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	
2308	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA - S-1 STATISTIKA - S-1 STATISTIKA TERAPAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi BIDANG DATA DAN INFORMASI	2	Rp9.700.000	Rp10.300.000	Melakukan kegiatan penganalisisan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi kebijakan di bidang Analisis statistik berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar	
2309	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bidang Preservasi I	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 RANCANG KOTA - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 SAINS DATA SPASIAL - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial	
2311	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 RANCANG KOTA - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial	
2312	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR - D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 GEOGRAFI - S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH - S-1 RANCANG KOTA - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Seksi Preservasi	2	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2313	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi BIDANG DATA DAN INFORMASI	1	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan ketersediaan Data dan Informasi Spasial, Statistik, serta Informasi Bencana	
2314	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi BIDANG DATA DAN INFORMASI	3	Rp9.400.000	Rp10.000.000	Melaksanakan ketersediaan Data dan Informasi Spasial, Statistik, serta Informasi Bencana	

**ALOKASI KEBUTUHAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS JENJANG TERAMPIL				982				
1	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Bagian Manajemen Perkantoran dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional unit kerja	
2	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
3	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
4	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
5	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
6	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
7	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisarunggarung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan di lingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
9	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Sub Bagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
10	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
11	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III TEKNIK PERPUSTAKAAN - D-III MANAJEMEN ASET - D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III MANAJEMEN INDUSTRI - D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN PEMASARAN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III KEARSIPAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN LOGISTIK - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN KEIMIGRASIAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS							
12	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan	
13	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan	
14	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
15	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan SUBBAGIAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
16	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
17	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
18	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
19	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Bidang Pemetaan Karier	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III TEKNIISI PERPUSTAKAAN - D-III MANAJEMEN ASET - D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III MANAJEMEN INDUSTRI - D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN PEMASARAN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III KEARSIPAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN LOGISTIK - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN KEIMIGRASIAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
21	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan	
22	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
23	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
25	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
26	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III MANAJEMEN ASET - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN PEMASARAN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III KEARSIPAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN KEIMIGRASIAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
27	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
28	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III TEKNIKI PERPUSTAKAAN - D-III MANAJEMEN ASET - D-III MANAJEMEN INDUSTRI - D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN PEMASARAN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III KEARSIPAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN LOGISTIK - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN KEIMIGRASIAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
30	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepegawaian dan Umum	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan	
31	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
32	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
34	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
35	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
36	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
37	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
38	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
39	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
40	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Subbagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
42	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
43	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
44	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
45	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
46	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
47	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
49	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
50	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
51	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
52	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
53	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
54	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
56	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
57	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
58	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
59	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN KEIMIGRASIAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
60	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Irigasi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
62	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
63	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III KEARSIPAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
64	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
65	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III TEKNISI PERPUSTAKAAN - D-III MANAJEMEN ASET - D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III MANAJEMEN INDUSTRI - D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN PEMASARAN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III ADMINISTRASI NIAGA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III KEARSIPAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN LOGISTIK - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN KEIMIGRASIAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Bahan Jalan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
67	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
68	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
69	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
71	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
72	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
73	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
74	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
75	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
76	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
77	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Pantai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
79	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III KEARSIPAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju	
80	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
81	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
82	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
83	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
84	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
86	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
87	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
88	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
89	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Kepegawaian dan Umum	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
90	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
91	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan	
92	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
94	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
95	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
96	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
97	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
98	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
99	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
100	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju.	
102	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju.	
103	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
104	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
105	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
106	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sungai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
107	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
109	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
110	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
111	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
112	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
113	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Talenta Bidang Kepatuhan Intern	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan	
114	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III PERPUSTAKAAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju.	
116	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
117	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
118	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Penilaian Kompetensi Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan	
119	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
120	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
121	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Rawa SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	
123	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
124	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dilingkungan unit kerja Ditjen Sumber Daya Air	
125	AUDITOR TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat I	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan intern, yaitu mengumpulkan data/informasi dalam penugasan assurance, menyiapkan data/dukungan untuk penugasan consulting dan penyusunan rencana pengawasan tahunan.	
126	AUDITOR TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat II	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan intern, yaitu mengklasifikasikan dan mengolah data/informasi dalam penugasan assurance dengan kompleksitas rendah, melaksanakan penugasan consulting yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sederhana, mengolah bahan/data dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan dan penyusunan laporan hasil pengawasan.	
127	AUDITOR TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat III	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan intern, yaitu mengumpulkan data/informasi dalam penugasan assurance, menyiapkan data/dukungan untuk penugasan consulting dan penyusunan rencana pengawasan tahunan.	
128	AUDITOR TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat IV	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan intern, yaitu mengumpulkan data/informasi dalam penugasan assurance, menyiapkan data/dukungan untuk penugasan consulting dan penyusunan rencana pengawasan tahunan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	AUDITOR TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat V	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan intern, yaitu mengumpulkan data/informasi dalam penugasan assurance, menyiapkan data/dukungan untuk penugasan consulting dan penyusunan rencana pengawasan tahunan.	
130	AUDITOR TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat VI	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan intern, yaitu mengumpulkan data/informasi dalam penugasan assurance, menyiapkan data/dukungan untuk penugasan consulting dan penyusunan rencana pengawasan tahunan.	
131	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara	
132	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara	
133	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Penilaian Kompetensi Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara	
134	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Subbagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara	
135	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Subbagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara	
136	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Subbagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara	
137	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III BISNIS INTERNASIONAL - D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III STATISTIKA BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Bahan Jalan	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
139	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III BISNIS INTERNASIONAL - D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III STATISTIKA BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
140	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III BISNIS INTERNASIONAL - D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III STATISTIKA BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Bagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
141	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III BISNIS INTERNASIONAL - D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III STATISTIKA BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III BISNIS INTERNASIONAL - D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III STATISTIKA BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000		
143	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
144	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III STATISTIKA BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
145	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III BISNIS INTERNASIONAL - D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III STATISTIKA BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III BISNIS INTERNASIONAL - D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III STATISTIKA BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
147	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
148	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III BISNIS INTERNASIONAL - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
149	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III BISNIS INTERNASIONAL - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
150	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
151	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
152	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III BISNIS INTERNASIONAL - D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III STATISTIKA BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subbagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
154	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III BISNIS INTERNASIONAL - D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III STATISTIKA BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pengadaan Tanah	4	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
155	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III BISNIS INTERNASIONAL - D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III STATISTIKA BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
156	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III STATISTIKA BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Subbagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
158	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah	
159	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.	
160	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Keuangan Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
161	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik SUBBAGIAN TATA USAHA	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan Tugas, Wewenang, tanggung Jawab dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik negara	
162	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Bagian Manajemen Perkantoran dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan tugas, wewenang, tanggung Jawab dan melaksanakan penatausahaan barang sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan	
163	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Umum Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan tugas, wewenang, tanggung Jawab dan melaksanakan penatausahaan barang sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GEOLOGI - D-III TEKNOLOGI MESIN - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
165	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III ALAT BERAT - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK ALAT BERAT - D-III OTOMASI SISTEM PERMESINAN - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA SIPIL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Seksi Persevasi	2	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melakukan Kegiatan Pengelolaan Layanan Teknis	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bidang Preservasi I	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
167	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK GEODESI - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
168	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bidang Preservasi I	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
169	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
170	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK SIPIL - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK GEODESI - D-III REKAYASA LINGKUNGAN - D-III REKAYASA SIPIL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
172	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK SIPIL - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III ALAT BERAT - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK ALAT BERAT - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA GEODESI - D-III REKAYASA GEOMATIKA - D-III REKAYASA LINGKUNGAN - D-III REKAYASA MATERIAL - D-III REKAYASA SIPIL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	3	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK KELAUTAN - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pengadaan Tanah	2	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
174	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK MESIN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Bidang Preservasi I	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
175	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNOLOGI KELAUTAN - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PEMELIHARAAN MESIN - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III ALAT BERAT - D-III MEKATRONIKA - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK ALAT BERAT - D-III OTOMASI SISTEM PERMESINAN - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI MESIN - D-III TEKNIK KELAUTAN - D-III TEKNOLOGI PENGELASAN LOGAM - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNOLOGI GEOMATIKA - D-III PERTAMANAN - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK PERAWATAN MESIN - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	3	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MESIN INDUSTRI - D-III TEKNIK PERANCANGAN MEKANIK - D-III PEMBUATAN PERALATAN DAN PERKAKAS PRODUKSI - D-III PEMELIHARAAN MESIN INDUSTRI LOGAM - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III TEKNOLOGI GEOLOGI - D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-III TEKNOLOGI ALAT BERAT - D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN - D-III TEKNOLOGI METALURGI - D-III TEKNOLOGI METALURGI INDUSTRI LOGAM - D-III TEKNOLOGI PEMBUATAN MESIN PERKAKAS - D-III TEKNOLOGI PEMBUATAN PERKAKAS PRESISI - D-III TEKNOLOGI PENGECORAN LOGAM - D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN MEKANIK - D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN MESIN PERKAKAS - D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN PERKAKAS PRESISI - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA GEODESI - D-III REKAYASA GEOMATIKA - D-III REKAYASA KELAUTAN - D-III REKAYASA LINGKUNGAN - D-III REKAYASA MATERIAL - D-III REKAYASA MESIN - D-III REKAYASA SIPIL - D-III ARSITEKTUR - D-III TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN							
176	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA GEODESI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Bidang Preservasi II	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
178	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK KELAUTAN - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNOLOGI KELAUTAN - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PEMELIHARAAN MESIN - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III ALAT BERAT - D-III MEKATRONIKA - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK ALAT BERAT - D-III OTOMASI SISTEM PERMESINAN - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI MESIN - D-III TEKNIK KELAUTAN - D-III TEKNOLOGI PENGELASAN LOGAM - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III PERTAMANAN - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK PERAWATAN MESIN - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-III TEKNIK MESIN INDUSTRI - D-III TEKNIK PERANCANGAN MEKANIK - D-III PEMBUATAN PERALATAN DAN PERKAKAS PRODUKSI - D-III PEMELIHARAAN MESIN INDUSTRI LOGAM - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III TEKNOLOGI GEOLOGI - D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN - D-III TEKNOLOGI METALURGI - D-III TEKNOLOGI METALURGI INDUSTRI LOGAM - D-III TEKNOLOGI PEMBUATAN MESIN PERKAKAS - D-III TEKNOLOGI PEMBUATAN PERKAKAS PRESISI - D-III TEKNOLOGI PENGECORAN LOGAM - D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN MEKANIK - D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN MESIN PERKAKAS - D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN PERKAKAS PRESISI - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA GEODESI - D-III REKAYASA GEOMATIKA - D-III REKAYASA KELAUTAN - D-III REKAYASA LINGKUNGAN - D-III REKAYASA MATERIAL - D-III REKAYASA MESIN - D-III REKAYASA SIPIL - D-III ARSITEKTUR - D-III TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN							

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Seksi Preservasi	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
181	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
182	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA GEODESI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Seksi Preservasi	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNOLOGI KELAUTAN - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PEMELIHARAAN MESIN - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III ALAT BERAT - D-III MEKATRONIKA - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK ALAT BERAT - D-III OTOMASI SISTEM PERMESINAN - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI MESIN - D-III TEKNIK KELAUTAN - D-III TEKNOLOGI PENGELASAN LOGAM - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNOLOGI GEOMATIKA - D-III PERTAMANAN - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK PERAWATAN MESIN - D-III TEKNIK GEODESI -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Bahan Jalan	3	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MESIN INDUSTRI - D-III TEKNIK PERANCANGAN MEKANIK - D-III PEMBUATAN PERALATAN DAN PERKAKAS PRODUKSI - D-III PEMELIHARAAN MESIN INDUSTRI LOGAM - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III TEKNOLOGI GEOLOGI - D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-III TEKNOLOGI ALAT BERAT - D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN - D-III TEKNOLOGI METALURGI - D-III TEKNOLOGI METALURGI INDUSTRI LOGAM - D-III TEKNOLOGI PEMBUATAN MESIN PERKAKAS - D-III TEKNOLOGI PEMBUATAN PERKAKAS PRESISI - D-III TEKNOLOGI PENGECORAN LOGAM - D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN MESIN PERKAKAS - D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN PERKAKAS PRESISI - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA GEODESI - D-III REKAYASA GEOMATIKA - D-III REKAYASA KELAUTAN - D-III REKAYASA LINGKUNGAN - D-III REKAYASA MATERIAL - D-III REKAYASA MESIN - D-III REKAYASA SIPIL - D-III ARSITEKTUR - D-III TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN							
184	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA GEODESI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah Seksi Preservasi	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
186	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PEMELIHARAAN MESIN - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III ALAT BERAT - D-III TEKNIK ALAT BERAT - D-III GEOLOGI - D-III TEKNOLOGI MESIN - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNOLOGI GEOMATIKA - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III TEKNOLOGI GEOLOGI - D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-III TEKNOLOGI ALAT BERAT - D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA SIPIL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	4	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
187	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara Seksi Preservasi	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
189	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK SIPIL - D-III ALAT BERAT - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNOLOGI MESIN - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III TEKNOLOGI GEOLOGI - D-III TEKNOLOGI ALAT BERAT - D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN - D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN MEKANIK - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PEMELIHARAAN MESIN - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III ALAT BERAT - D-III MEKATRONIKA - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK ALAT BERAT - D-III OTOMASI SISTEM PERMESINAN - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III PEMBUATAN PERALATAN DAN PERKAKAS PRODUKSI - D-III PEMELIHARAAN MESIN INDUSTRI LOGAM - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA GEODESI - D-III REKAYASA GEOMATIKA - D-III REKAYASA LINGKUNGAN - D-III REKAYASA MATERIAL - D-III REKAYASA SIPIL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	3	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
192	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III PEMELIHARAAN MESIN - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III ALAT BERAT - D-III MEKATRONIKA - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK ALAT BERAT - D-III OTOMASI SISTEM PERMESINAN - D-III GEOLOGI - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI MESIN - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNOLOGI GEOMATIKA - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK PERAWATAN MESIN - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MESIN INDUSTRI - D-III TEKNIK PERANCANGAN MEKANIK - D-III PEMBUATAN PERALATAN DAN PERKAKAS PRODUKSI - D-III PEMELIHARAAN MESIN INDUSTRI LOGAM - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III TEKNIK GEOLOGI -	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Seksi Preservasi	3	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D-III TEKNOLOGI GEOLOGI - D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-III TEKNOLOGI ALAT BERAT - D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN - D-III TEKNOLOGI METALURGI - D-III TEKNOLOGI PEMBUATAN MESIN PERKAKAS - D-III TEKNOLOGI PEMBUATAN PERKAKAS PRESISI - D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN MEKANIK - D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN MESIN PERKAKAS - D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN PERKAKAS PRESISI - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA GEODESI - D-III REKAYASA GEOMATIKA - D-III REKAYASA LINGKUNGAN - D-III REKAYASA MATERIAL - D-III REKAYASA MESIN - D-III REKAYASA SIPIL - D-III ARSITEKTUR - D-III TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN							
193	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK KELAUTAN - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bidang Preservasi II	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
195	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bidang Preservasi II	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
196	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
197	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL - D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III ALAT BERAT - D-III TEKNIK ALAT BERAT - D-III GEOLOGI - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA SIPIL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Bidang Preservasi	2	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
198	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK ALAT BERAT - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
199	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
200	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA GEODESI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bidang Preservasi II	2	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan	3	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
202	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GEOLOGI - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III GAMBAR ARSITEKTUR - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK PLANOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
204	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK MESIN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III TEKNIK MATERIAL - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III ARSITEKTUR	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Seksi Preservasi	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
205	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNIK GEOLOGI - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK GEODESI - D-III ARSITEKTUR	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-III TEKNOLOGI SIPIL - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN - D-III REKAYASA GEODESI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bidang Preservasi I	2	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan jembatan	
207	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
208	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
209	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
210	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
212	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
213	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
214	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
215	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
216	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
218	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
219	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
220	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
221	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
222	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
223	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisarunggarung Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
224	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisarunggarung BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
225	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisarunggarung BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
226	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisarunggarung BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
227	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
228	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
229	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BIDANG PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
230	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
231	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bidang Operasi dan Pemeliharaan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
232	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
233	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
235	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
236	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
237	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
238	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
239	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
240	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
241	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
242	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
243	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
244	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
245	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
247	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
248	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
249	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
250	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bidang Operasi dan Pemeliharaan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
251	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
253	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
254	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
255	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SEKSI KAJIAN BENDUNGAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
256	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SEKSI PEMANTAUAN BENDUNGAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
257	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SEKSI PROGRAM, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
258	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Irigasi	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
259	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Pantai	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
260	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Rawa	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
261	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
262	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sungai	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
263	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
265	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
266	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
267	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
268	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
269	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
270	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
271	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
272	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
273	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
274	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
275	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
276	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
277	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
278	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
279	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
281	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
282	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
283	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
284	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
286	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
287	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
288	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
289	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
290	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
291	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
292	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
293	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
294	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
295	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
296	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
297	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
298	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
299	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
300	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
301	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
302	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
303	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
304	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
305	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
306	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
307	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
308	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
310	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
311	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
312	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
313	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
315	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
316	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
317	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
318	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
319	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
320	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
321	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
322	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
323	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
324	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
325	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
326	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
327	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
328	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
329	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
330	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SEKSI PELAKSANAAN	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
332	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Wilayah I	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
333	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Wilayah II	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
334	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subdirektorat Wilayah III	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
335	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
336	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Wilayah I	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Wilayah II	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
338	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subdirektorat Wilayah III	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
339	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
340	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Wilayah I	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
341	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Wilayah II	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
342	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdirektorat Wilayah III	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
343	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
344	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subdirektorat Keamanan Bangunan Air	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
345	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
346	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
347	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Wilayah I	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
348	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Wilayah II	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
349	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subdirektorat Wilayah III	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
350	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
351	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
352	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Keterpaduan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
353	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengadaan Tanah	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
354	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
355	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
356	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
357	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Wilayah I	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
358	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Wilayah II	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
359	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subdirektorat Wilayah III	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
360	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bidang Operasi dan Pemeliharaan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bidang Pelaksanaan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
362	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ELEKTRO - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bidang Perencanaan	1	Rp7.600.000	Rp8.100.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilingkungan unit kerja	
363	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-III KOMUNIKASI - D-III DESAIN GRAFIS - D-III JURNALISTIK	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan teknis di bidang pelayanan informasi dan kehumasan	
364	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-III KOMUNIKASI - D-III DESAIN GRAFIS - D-III JURNALISTIK	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Bagian Administrasi Akademik dan Umum Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan teknis di bidang pelayanan informasi dan kehumasan	
365	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III PERIKLANAN - D-III PENERBITAN - D-III KOMUNIKASI MASSA - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-III KOMUNIKASI - D-III FOTOGRAFI - D-III DESAIN GRAFIS - D-III TEKNOLOGI CETAK DAN GRAFIS - D-III JURNALISTIK - D-III PENYIARAN - D-III MULTIMEDIA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	
366	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III PENERBITAN - D-III KOMUNIKASI MASSA - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-III KOMUNIKASI - D-III FOTOGRAFI - D-III DESAIN GRAFIS - D-III JURNALISTIK - D-III PENYIARAN - D-III MULTIMEDIA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
367	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
368	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
369	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi	
370	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
371	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Penilaian Kompetensi Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi	
372	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Subbagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
373	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Subbagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi	
374	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
375	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
376	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
377	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
378	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
379	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
380	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
381	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
382	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Subbagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
383	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Subbagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
384	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	
385	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
386	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bagian Umum dan Tata Usaha	9	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
387	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I .Yogyakarta Bagian Umum Dan Tata Usaha	4	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
388	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
389	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
390	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
391	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
392	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
393	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	16	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
394	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
395	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Bagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
396	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
397	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Jembatan Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
398	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
399	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung Subbagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
400	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
401	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Subbagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
403	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
404	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Subbagian Umum dan Tata Usaha	7	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
405	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	PUTRA/PUTRI PAPUA	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
406	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	7	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
407	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
408	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
409	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
410	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
411	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	7	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
412	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
413	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
414	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	9	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
415	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Subbagian Umum dan Tata Usaha	5	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
417	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	5	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
418	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
419	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
420	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
421	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	16	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
422	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
423	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	8	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
424	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Subbagian Umum dan Tata Usaha	5	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
425	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
426	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
427	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
428	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
429	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Subbagian Tata Usaha	7	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
430	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
431	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
432	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
433	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pengadaan Tanah	7	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
434	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
435	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
436	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
437	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
438	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
439	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Subbagian Tata Usaha	4	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
440	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
441	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang meliputi kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.	
442	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Sub Bagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
443	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang meliputi kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
444	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang meliputi kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan penyiapan analisis laporan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang meliputi kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
446	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang meliputi kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.	
447	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang meliputi kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi	
448	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
449	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
450	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
451	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
452	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
453	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
454	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
455	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
456	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
457	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
458	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
459	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
460	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
461	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
462	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Irigasi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
463	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Pantai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
464	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Rawa SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
465	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
466	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sungai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
467	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
468	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
469	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
470	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
471	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
472	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
473	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
474	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
475	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
476	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
477	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
478	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
479	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
480	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
481	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
482	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
483	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
484	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
485	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
486	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
487	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
488	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
489	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
490	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
491	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
492	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan SUBBAGIAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
493	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
494	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
495	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Kepatuhan Intern Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
496	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
497	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
498	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
499	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	
501	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat I Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.	
502	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat II Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.	
503	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat III Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.	
504	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat IV Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.	
505	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat V Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	JMelaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	Inspektorat Jenderal Inspektorat VI Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.	
507	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Sekretariat Jenderal BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Subbagian Tata Usaha	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.	
508	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik SUBBAGIAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.	
509	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik SUBBAGIAN TATA USAHA	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.	
510	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN KEUANGAN - D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi SUBBAGIAN TATA USAHA	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN	
511	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan penggandaan data, deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network), pencatatan infrastruktur teknologi informasi	
512	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan penggandaan data, deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network), pencatatan infrastruktur teknologi informasi	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
513	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan penggandaan data, deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network), pencatatan infrastruktur teknologi informasi	
514	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Bagian Administrasi Akademik dan Umum Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan penggandaan data, deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network), pencatatan infrastruktur teknologi informasi	
515	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
516	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I . Yogyakarta Bagian Umum Dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
517	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I . Yogyakarta Bagian Umum Dan Tata Usaha	5	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
518	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
519	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
520	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
521	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bidang Preservasi I	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
522	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali Bidang Preservasi II	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
523	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
524	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
525	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
527	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
528	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
529	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pengadaan Tanah	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
530	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III PERANCANGAN PERMAINAN - D-III TEKNOLOGI PERMAINAN - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Subdirektorat Wilayah II.A	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
531	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
532	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
533	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
534	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
535	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
536	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau- Ciujung-Cidurian BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
537	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
538	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
539	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
540	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
541	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
542	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
543	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
544	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
545	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
546	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
547	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Irigasi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
548	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Pantai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
549	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Rawa SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
550	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
551	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sungai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
552	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
553	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
554	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
555	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
556	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
557	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
558	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
559	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
560	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
561	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
562	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
563	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
564	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
565	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
566	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
567	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
568	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
569	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
570	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
571	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
572	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
573	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
574	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
575	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bendungan dan Danau Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
576	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan SUBBAGIAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
577	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
578	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
579	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
580	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
581	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
582	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Kepegawaian dan Umum	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
583	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer dilingkungan unit kerja	
584	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG - D-III TEKNIK SIPIL DAN BANGUNAN - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR	PUTRA/PUTRI PAPUA	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Bagian Administrasi Akademik dan Umum Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium	
585	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL	D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL - D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG - D-III TEKNIK SIPIL DAN BANGUNAN - D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Pekerjaan Umum Bagian Administrasi Akademik dan Umum Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	9	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium	
586	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN PERSONALIA	UMUM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepegawaian dan Umum	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian ASN	
587	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN PERSONALIA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
588	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN PERSONALIA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.	
589	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN PERSONALIA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	
590	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	
591	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	
592	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Bagian Umum dan Tata Usaha	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
593	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN PERSONALIA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Bagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	
594	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Subbagian Umum dan Tata Usaha	4	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	
595	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	
596	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN PERSONALIA - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
597	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN PERSONALIA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	
598	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN PERSONALIA - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	
599	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	
600	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN PERSONALIA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
601	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subbagian Tata Usaha	3	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	
602	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN PERSONALIA - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Pengadaan Tanah	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi demi meningkatnya kinerja.	
603	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	
604	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Sub Bagian Tata Usaha	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	"Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
605	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	
606	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	
607	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Air Tanah SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
608	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
609	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
610	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
612	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
613	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
614	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
615	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
616	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
617	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Bagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
618	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
619	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
620	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Bendungan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
621	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Irigasi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
622	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Pantai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
623	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Rawa SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
624	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sabo SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
625	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Teknik Sungai SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
626	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
627	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
628	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
629	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air	
630	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
631	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
632	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
633	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
634	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku Utara SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
635	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
636	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
637	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
638	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
639	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
640	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
641	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
642	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
643	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
644	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
645	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	PENYANDANG DISABILITAS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
646	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
647	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
648	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
649	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Air Tanah dan Air Baku Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
650	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
651	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
652	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	

NO	JABATAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN			KISARAN PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN	KETERANGAN
			JENIS KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH	TERENDAH	TERTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
653	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Subbagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
654	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Bagian Tata Usaha	1	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	
655	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bagian Kepegawaian dan Umum	2	Rp7.700.000	Rp8.300.000	Jabatan ini mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil	